



pasuruan
always fresh

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



PEMERINTAH KABUPATEN
PASURUAN

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukurkehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dengan tepat waktu.

LKjIP Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2020. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* pada Organisasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Penyusunan LKjIP Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 ini merupakan kinerja berbasis Outcome yang menjadi kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dan merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Pasuruan, serta atas dukungan/ partisipasi berbagai elemen masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan yang telah memberikan sumbangsinya untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.

Demikian LKjIP Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja dan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pasuruan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pasuruan, 22 Maret 2021

BUPATI PASURUAN,

H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GRAFIK	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Maksud dan Tujuan.....	9
1.3 Gambaran Umum Daerah	10
1.4 Isu Strategis yang Berkembang pada Tahun 2019.....	19
1.5 Prioritas Daerah	21
1.6 Dasar Hukum	21
1.7 Sistematika Penyusunan.....	22

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	42
3.2 Prestasi Dan Penghargaan	138

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan.....	139
-------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan	19
2.1 Ringkasan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan .	28
2.2 Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruanyang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30
2.3 Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 1.....	31
2.4 Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 2.....	32
2.5 Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 3.....	33
2.6 Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 4.....	34
2.7 Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 5.....	35
2.8 Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 6.....	38
3.1 Skala Ordinal Pengukuran Kinerja.....	43
3.2 Pencapaian Kinerja Tujuan 1	44
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1	45
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s.d. Akhir Periode RPJMD.....	45
3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 dengan Realisasi Nasional.....	45
3.6 Kegiatan Pasar Murah, Gelar Produk, Misi Dagang, dan Promosi Dagang Tahun 2020	55
3.7 Rincian Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Obyek Wisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan 2020	56
3.8 Rincian Jumlah Kunjungan Hotel Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	57



3.9	Pencapaian Kinerja Tujuan 2	64
3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2	64
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2 s.d. Akhir Periode RPJMD.....	64
3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2 dengan Realisasi Nasional.....	65
3.13	Pencapaian Kinerja Tujuan 3	70
3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja.....	71
3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD.....	71
3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	71
3.17	Rincian Skor Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020	72
3.18	Pencapaian Kinerja Tujuan 4	77
3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4.....	77
3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4 s.d. Akhir Periode RPJMD.....	77
3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4 dengan Realisasi Nasional.....	77
3.22	Kondisi Jembatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	81
3.23	Kondisi Drainase Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	82
3.24	Panjang Turap/Talud/Bronjong Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	82
3.25	Panjang Jalan yang ber PJU Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	83
3.26	Pencapaian Kinerja Tujuan 5	97
3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5.....	97
3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5 s.d. Akhir Periode RPJMD.....	98



3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5 dengan Realisasi Nasional.....	98
3.30 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Per Masing-Masing Komponen dan Sub Komponen Tahun 2019 dan 2020	98
3.31 Hasil penilaian AKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan 2020	100
3.32 Hasil Evaluasi SAKIP OPD Di Lingkungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan 2020	101
3.33 Perbandingan Skor dan Peringkat Hasil Evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – 2020	103
3.34 Perkembangan Jumlah Penduduk yang Ber – KTPTahun 2019 – 2020	104
3.35 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASNTahun 2020	109
3.36 Pencapaian Kinerja Tujuan 6	117
3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6.....	117
3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6 s.d. Akhir Periode RPJMD.....	118
3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6 dengan Realisasi Nasional.....	118
3.40 Perkembangan Jumlah Kekerasan (KDRT) Tahun 2019 dan 2020	127
3.41 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020.....	132
3.42 Alokasi Anggaran Per Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020	135
3.43 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020.....	136



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Metode Baru Tahun Dasar 2010 Tahun 2016 – 2020	47
3.2 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – 2020	52
3.3 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – 2020	54
3.4 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020	66
3.5 Realisasi Pencari Kerja yang Ditempatkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2020	68
3.6 Perkembangan Indeks Wiliamson/Indeks Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – 2020.....	79
3.7 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – 2020	88
3.8 Perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – 2020	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterbitkan dalam rangka



mengakomodir kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP pada prinsipnya merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Memberikan informasi terkait tingkat pelaksanaan semua rencana / kegiatan untuk mencapai tujuan. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2020
2. Sebagai media komunikasi bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.



3. Sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada seluruh pihak eksternal (stakeholders) atas kinerja selama tahun 2020, substansi capaian kinerja yang dilaporkan menunjukkan sejauh mana pelaksanaan rencana dan kegiatan telah tercapai untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran untuk periode tersebut.

1.2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah:

1. Mendapatkan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun anggaran 2020.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan memberikan usulan dalam rangka peningkatan kinerja instansi internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.
3. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan andal meliputi efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

1.3 Gambaran Umum Daerah

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474.015 kilometer persegi terletak di antara 112°35'30" hingga 113°06'30" Bujur Timur dan antara 7°32'30" hingga 7°57'30" Lintang Selatan. Berbatasan dengan Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo di utara, Kabupaten Malang di selatan, Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu di barat, dan Kabupaten Probolinggo di timur. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan beragam, terdapat 3 jenis batuan yaitu batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api kuarter muda (*young quaternary*) dan kuarter tua (*old quaternary*).



Selanjutnya secara topografis, kondisi Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan berdasarkan kelerengan dan ketinggian. Tingkat kelerengan Kabupaten Pasuruan meliputi:

Selain itu dari kondisi topografis, Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan berdasarkan kelerengan dan ketinggian meliputi:

1. Kelerengan 0 - 2% : seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling.
2. Kelerengan 2 –5% : sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.
3. Kelerengan 5 - 8%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok.
4. Kelerengan 8 - 15% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati.
5. Kelerengan 15 - 25% :sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji.
6. Kelerengan 25 – 45% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol.
7. Kelerengan > 45% :sebagian Kecamatan Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

Adapun kondisi menurut ketinggian diuraikan sebagai berikut:

1. Ketinggian 0 – 12,5 mdpl seluas 18.819,04 Ha atau 12,77%, berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan yaitudi sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, dan Nguling.
2. Ketinggian 12,5 – 500 mdpl seluas 50.384,02 Ha atau 34%, berpotensi untuk pengembangan pertanian, permukiman, dan perindustrian yaitu



di sebagian wilayah semua kecamatan, kecuali Kecamatan Tosari.

3. Ketinggian 500 – 1000 mdpl seluas 21.877,17 Ha atau 14,84%, berpotensi untuk budidaya tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring, yaitu di sebagian Kecamatan Lumbang, Gempol, Purwodadi, Tukur, Tosari, Pasrepan, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
4. Ketinggian 1.000 – 2.000mdpl seluas 18.615,08 Ha atau 12,63%, berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, yaitu di sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
5. Ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 Ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukan sebagai hutan lindung yang berfungsi melindungi kawasan bawahannya, yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

1.3.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2020 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk tahun 2020 mencapai sejumlah 1.605.969 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 803.730 jiwa dan perempuan sebanyak 802.239 jiwa, dengan *sex ratio* sebesar 100,19.
2. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tahun 2020, secara proporsional terbagi menjadi kelompok :
 - a. Tidak/belum tamat sekolah : 18,50 %
 - b. Belum tamat SD/ sederajat : 19,79 %
 - c. Tamat SD/ sederajat : 30,81 %
 - d. SLTP/ sederajat : 13,38 %
 - e. SLTA/ sederajat : 14,46 %



- f. Diploma I/II/III : 0,56 %
- g. Diploma IV/Strata 1 : 2,18 %
- h. Strata 2/3 : 0,11 %

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/ sederajat, kemudian belum tamat SD/ Sederajat, dan terendah pada jenjang pendidikan diploma/strata-1/2/3.

3. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) berdasarkan data tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Post Generasi Z (0-7 tahun) : 10,20 %
- b. Generasi Z (8-23 tahun) : 25,57 %
- c. Milenial (24-39 tahun) : 25,44 %
- d. Generasi X (40-55 tahun) : 23,97 %
- e. Baby Boomer (56-74 tahun) : 12,94 %
- f. Pre-Boomer (75 tahun ke atas) : 1,88 %

Berdasarkan data tersebut Kabupaten Pasuruan masih dalam masa bonus demografi karena 71,80 persen penduduknya masih berada di usia produktif (15-64 tahun). Proporsi generasi Z dan Milenial termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi

4. Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional berdasarkan data tahun 2020 diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Belum/Tidak Bekerja/Mengurus rumah tangga : 35,05%
- 2) Pelajar/Mahasiswa : 14,95%
- 3) Pensiunan : 0,32%
- 4) Pegawai Negeri Sipil : 0,64%
- 5) TNI/Polri : 0,20%
- 6) Petani/Peternak/Nelayan : 13,99%
- 7) Karyawan Swasta/BUMN/BUMD : 20,66%
- 8) Buruh Harian Lepas : 2,07%



10) Guru/Dosen	: 0,67%
11) Dokter/Bidan/Perawat	: 0,08%
12) Pedagang/Wiraswasta	: 0,30%
13) Lain-Lain	: 10,92%
Bekerja	0,65%
Pengangguran Terbuka	0,04%
Sekolah	0,07%
Rumah Tangga	0,20%
Lainnya	0,04%

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lima tertinggi proporsipenduduk berdasarkan pekerjaan adalah :

- 1) belum/tidak bekerja/ibu rumah tangga sebesar 35,05%;
- 2) karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,66%;
- 3) pelajar/mahasiswa sebesar 14,95%;
- 4) petani/peternak/nelayan sebesar 13,99%; dan
- 5) lain-lain sebesar 10,92%.

1.3.3 Ekonomi dan Sosial Daerah

1. Potensi Daerah

a. Posisi Strategis Wilayah

Kabupaten Pasuruan terletak di delta Surabaya-Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya-Malang dan Malang-Jember / Banyuwangi / Bali, jalur ekonomi yang sangat strategis dan bernilai ekonomis. Selain itu, pembangunan tol Gempol-Malang serta tol Gempol-Pasuruan dan Pasuruan-Probolinggo menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai pilihan yang tepat untuk pengembangan investasi manufaktur.

b. Potensi Sumberdaya Air

Kabupaten Pasuruan memiliki enam sungai utama yang melintasi Selat Madura, yaitu Sungai Rumpu, Sungai Rejoso, Sungai



Gembong, Sungai Verang, Sungai Masang dan Sungai Ketun Lalangan. Oleh karena itu, tingkat pemenuhan kebutuhan air pertanian sudah cukup. Selain itu, terdapat danau dan banyak sumber air panas di sini. Danau Ranu Grati di Kecamatan Grati memiliki volume efektif 5.013 m, volume maksimum 5.217 m, debit maksimum 980 l/det, dan debit minimum 463 l/det. Sementara itu, sebanyak 471 mata air tersebar di seluruh wilayah, yang terbesar adalah Umbulan di Kabupaten Winongan. Mata air payung tidak hanya cukup untuk warga Kabupaten Pasuruan saja, tetapi juga cukup di daerah lain di Jawa Timur, antara lain Kota Pasuruan, Kabupaten Cidoarjo, dan Kota Surabaya. Selain itu, terdapat pemandian air panas Banyu Biru di kawasan Weinon'an. Di lereng bukit banyak terdapat sumur artesis atau sumur bebas stres.

c. Ketersediaan Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah khususnya jalan di Kabupaten Pasuruan meliputi jalan raya nasional sepanjang 97,94 km, jalan raya provinsi sepanjang 88,05 km, dan jalan raya kabupaten sepanjang 2.315,89 km. Selain itu, ada tol Gempol-Malang, Gempol-Pasuruan, dan tol Pasuruan-Probolinggo. Transportasi darat di Kabupaten Pasuruan juga didukung oleh jalur kereta api, terdapat beberapa stasiun kereta api yang menghubungkan jalur Surabaya-Malang / Blitar dan Surabaya-Jenbo / Banyuwangi.

d. Potensi Wisata

Potensi wisata Kabupaten Pasuruan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata pertanian dan wisata minat khusus. Wisata alam tersebut antara lain: Gunung Bromo, Taman Candra Wilwatikta di Pandaan, Air Terjun Kakek Bodho dan Air Terjun Putuk Truno di Prigen, Pemandian Alam Banyubiru di Winongan, Danau Ranu di Grati, Sumber Air Umbulan di Winongan dan Air Terjun Coban



Baung di Purwodadi. Wisata budaya dan religi antara lain Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Jawi, Gua Jepang / Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan di Bangil, Makam Mbah Semendhi di Winongan, Makam Mbah Segoropuro di Rejoso, Istana dan Pertapaan Abiyoso serta area Masjid Cheng Ho.

Wisata pertanian berada di Kecamatan Tukur meliputi wisata apel/Agro Krisna, Bunga Krisan dan Paprika, Peternakan Sapi Perah, Jamur, Durian, Wisata Bhakti Alam. Kemudian ada PG Kedawung di Kabupaten Grati, Bunga sedap malam di Kabupaten Mangga Klon 21 dan Kabupaten Rembang, serta Kebun Raya LIPI di Kabupaten Purwodadi.

Wisata Minat Khusus antara lain di Kecamatan Prigen yaitu Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Kaliandra, dan Finna Golf & Country Club. Kemudian Bukit Flora di Kecamatan Tukur, Baung Camp di Kecamatan Purwodadi, dan sentra bordir di Kecamatan Bangil.

e. Kawasan Industri

Kawasan industri Kabupaten Pasuruan terletak di Kecamatan Rembang yaitu PT. PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) memiliki luas tanah 560 hektar dan luas bangunan sekitar 60%. Sebagai kawasan industri, PIER menyediakan infrastruktur yang memadai berupa air bersih, listrik, dan pengolahan limbah. Di luar kawasan industri, pengembangan industri dapat dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan, seperti Kecamatan Beji, Gempol, Pandaan, Sukorejo, dan Rembang.

f. Industri Rumah Tangga/Kecil

Industri kecil / rumah tangga di Pasuruan sangat beragam, meliputi pengolahan makanan / minuman, konveksi dan furniture / kerajinan kayu.



Sentra Bakpia dan Klepon serta pusat konveksi pakaian berada di Kecamatan Gempol. Pusat Konveksi Bordir ini berlokasi di Kabupaten Bangil dan daerah lain seperti Beji dan Rembang dan menghasilkan produk antara lain Mukena dan pakaian muslim. Sentra kerajinan kayu berada di Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tambaksari Kraton, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Wonorejo, Sungikulon dan Kecamatan Sungiwetan Pohjentrek, Kabupaten Winongan dan Kabupaten Rejoso. Produknya antara lain mainan anak-anak, setir mobil, kotak tisu, *handle perseneling*, *dashboard*, catur dan *meubelair*, serta kerajinan perak yang ditemukan di kabupaten Bangil. Beberapa hasil industri kecil tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dapat diekspor ke luar daerah dan luar negeri.

g. Komoditi Sektor Pertanian

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang besar, diantaranya berupa tanaman hortikultura dan hasil peternakan. Tanaman hortikultura antara lain buah-buahan seperti mangga dari Kecamatan Rembang, Kraton dan Grati, durian dan apel dari Kecamatan Tukur. Terdapat beberapa jenis bunga seperti krisan dan sedap malam di Kecamatan Rembang dan sayur mayur seperti kentang dan paprika di Kecamatan Tukur dan Tosari. Produk peternakan, seperti sapi perah (di kawasan Grati, Pwodadi, Longbang dan Tutu), memiliki potensi yang besar, selain diolah menjadi berbagai jenis pangan (antara lain permen, minuman susu kemasan dengan berbagai rasa), juga dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten (Pasuruan) yaitu PT. Nestlé berlokasi di Kecamatan Kejayan dan PT. Indolakto di kabupaten Purwosari.

2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun



2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Dinas Daerah (22 PD) yaitu : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Badan Daerah (5 PD) yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- g. Kecamatan (24 Kecamatan),
- h. Kelurahan dan Desa (24 Kelurahan dan 341 Desa),
- i. UPT Dinas/Badan.(150 UPT Dinas/Badan)

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil selaku instrumen penunjang pelaksanaan



tugas pokok dan fungsi PD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data Simpeg Tahun 2020 sebanyak 9.359 orang yang terdiri dari laki-laki 4.216 orang dan perempuan 5.143 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil		Jumlah
	Laki -laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]
SD <i>Elementary School</i>	55	7	62
SLTP / MTs <i>Junior High School</i>	152	16	168
SLTA / SMK / MA <i>Senior High School</i>	1.139	398	1.537
D-I <i>1 Year Diploma</i>	6	30	36
D-II <i>2 Year Diploma</i>	146	127	273
D-III / Sarmud / Akademi <i>Academy</i>	215	731	946
D-IV / S-1 <i>Bachelor</i>	2.173	3.583	5.756
S-2 <i>Master</i>	328	250	578
S-3 <i>Doctorate</i>	2	1	3
Jumlah / Total 2020	4.216	5.143	9.359

Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah, 2020

1.4 Isu Strategis yang Berkembang pada Tahun 2020

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:



1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi (indeks pembangunan manusia) yang bersinergi dengan pembangunan berbasis karakter
2. Pengentasan kemiskinan secara integratif (aspek sosial, ekonomi, fisik/lingkungan) dan holistik (akar permasalahan dan intervensi program)
3. Pengembangan potensi desa sehingga menjadi desa yang mandiri
4. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja untuk meningkatkan kesempatan kerja di sektor formal dan informal
5. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di semua wilayah yang mendukung kelancaran distribusi barang/jasa dan orang sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah
6. Peningkatan manajemen kebencanaan untuk mengurangi dampak/risiko terjadinya bencana yang terjadi setiap tahun
7. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kewilayahan berupa pengembangan agropolitan dan minapolitan
8. Pengarusutamaan sektor pariwisata yang mampu menggerakkan sektor-sektor lain sebagai media pemasaran daerah (regional marketing)
9. Peningkatan penanganan masalah lingkungan secara integratif berbasis pemberdayaan masyarakat
10. Pemantapan ketersediaan pangan dan pengembangan pola pangan didukung penyediaan sarana prasarana yang baik
11. Pemantapan keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan budaya lokal
12. Peningkatan penerapan e-government di semua aktivitas pemerintahan daerah dalam rangka menuju smart city
13. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang cepat, murah dan tanpa pungutan liar



1.5 Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 bahwa pembangunan daerah difokuskan pada “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Maslahat”. Hal tersebut ditegaskan dan dijabarkan kembali dalam dokumen RKPD Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia berbasis keluarga dan pengentasan kemiskinan
2. Pemantapan sarana prasarana wilayah dan memperkuat konektivitas
3. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan ekonomi kreatif
4. Pemantapan ketahanan pangan, air, dan pelestarian lingkungan hidup
5. Penguatan kohesi sosial berbasis religiusitas dan budaya
6. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.6 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

1.7 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Kabupaten Pasuruan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; berisi penjabaran latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum daerah, isu strategis, prioritas daerah, dasar hukum, dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA; berisi penjelasan tentang muatan visi, misi dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA; berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dengan realisasi Nasional serta membandingkan dengan target akhir RPJMD;
2. Mengetahui persentase anggaran pada masing-masing tujuan strategis dibandingkan dengan total anggaran, capaian kinerja dengan anggaran serta efisiensi penggunaan sumberdaya.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP; berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Kabupaten Pasuruan tahun 2020 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN:

1. Matriks RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.
3. Matriks Pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.
4. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020.
6. Laporan Realisasi Anggaran Per-Program Tahun 2020.



7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
8. Penghargaan yang Pernah Diterima Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 22 Maret 2019 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing

2.1.2 Misi

Upaya untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan dengan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2018-2023. Misi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat;
- 2) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial;



- 3) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di kabupaten di Kabupaten Pasuruan;
- 4) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi; dan
- 5) Meningkatnya pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, pemukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi Kabupaten Pasuruan 2018-2023 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai misi 1, ditetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan, yaitu:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif;
 - 2) Meningkatnya kunjungan pariwisata;
 - 3) Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat;
 - 4) Meningkatnya kemandirian desa; dan



- 5) Meningkatnya ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kesempatan lapangan kerja baru; dan
 - 2) Meningkatnya penanggulangan PMKS.
2. Dalam rangka mencapai misi 2, ditetapkan tujuan pembangunan "*Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum*", dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda; dan
 - b. Menurunnya konflik SARA.
3. Dalam rangka mencapai misi 3, ditetapkan tujuan pembangunan "*Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan*", dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Menurunnya dampak bencana;
 - c. Meningkatnya aksesibilitas wilayah;
 - d. Meningkatnya aksesibilitas transportasi; dan
 - e. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air.
4. Dalam rangka mencapai misi 4, ditetapkan tujuan pembangunan "*Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif*", dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Meningkatnya kualitas Sistem Keuangan Daerah;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
 - d. Meningkatnya profesionalitas ASN.
5. Dalam rangka mencapai misi 5, ditetapkan tujuan pembangunan "*Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas*", dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan;



- b. Meningkatnya pelayanan dasar pendidikan;
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat;
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
- e. Meningkatnya kesetaraan masyarakat; dan
- f. Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen terkait dengan pernyataan kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan guna mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dengan fokus pembangunan tahun 2020 “Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik”, yang terdiri dari komponen pokok:



Ringkasan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No.	Komponen Pokok	Jumlah
1.	Tujuan Strategis	6
2.	Indikator Kinerja	6
3.	Target kinerja	6
4.	Program	171



2.2.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 terdiri atas 5 misi yang dijabarkan dalam 6 (enam) tujuan strategis dengan uraian sebagai berikut:

- a. MISI 1: *Meningkatnya kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.* Misi ini dijabarkan dalam dua tujuan strategis sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
 - 2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. MISI 2: *Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.* Misi ini dijabarkan dalam satu tujuan strategis, yaitu: Mewujudkan kerukunan, keamanan dan ketertiban umum.
- c. MISI 3: *Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di kabupaten di Kabupaten Pasuruan.* Misi ini dijabarkan dalam satu tujuan strategis, yaitu: Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
- d. MISI 4: *Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.* Misi ini dijabarkan dalam satu tujuan strategis yaitu: Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif.



- e. MISI 5: *Meningkatnya pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, pemukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.* Misi ini dijabarkan dalam satu tujuan strategis yaitu: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

2.2.2 Target Kinerja Tahun 2020

Target Kinerja Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1.1. Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,73 – 6 %
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.2. Angka kemiskinan	9,35 %
3	Mewujudkan kerukunan, keamanan dan ketertiban umum.	2.1. Indeks Kesalehan Sosial	62,40
4	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	3.1. Indeks Wiliamson	0,255
5	Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	4.1. Indek Reformasi Birokrasi	64,00
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.	5.1 IPM	68,90



2.2.3 Program Kerja

Dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan strategis dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 171 Program dengan anggaran sebesar Rp1.469.462.400.037,71, rincian sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan 1 “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*” telah ditetapkan program-program dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3

Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 1

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian	994.391.937,00
2	Program Perdagangan	471.260.801,00
3	Program Perikanan Budidaya	2.577.863.220,00
4	Program Kenelayanan	399.285.000,00
5	Program Kesehatan Hewan	1.444.819.782,42
6	Program Usaha Peternakan	476.321.290,00
7	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	267.970.000,00
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Dan Perkebunan	580.458.219,00
9	Program Sarana Dan Prasarana Hasil Pertanian	13.654.444.150,00
10	Program Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.291.702.206,00
11	Program Pengelolaan Pasar	16.013.399.000,00
12	Program Produksi Tanaman Perkebunan	472.301.399,74
13	Program Pengembangan Usaha Koperasi	217.026.638,00
14	Program Usaha Perikanan	225.285.000,00
15	Program Pembinaan Industri	27.223.765,00
16	Program Peningkatan Industri	698.815.500,00
17	Program Seni Dan Budaya	1.626.818.500,00
18	Program Destinasi Wisata	5.930.138.392,00



No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
19	Program Pengembangan Potensi Desa Dan Kelurahan	93.631.600,00
20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	608.488.500,00
21	Program Pengembangan Usaha Mikro	254.043.000,00
22	Program Peningkatan Produksi Peternakan	2.285.901.534,00
23	Program Industri Pariwisata	344.050.000,00
24	Program Promosi Pariwisata	1.197.165.000,00
	Jumlah	52.152.804.434,16

2. Untuk mencapai tujuan 2 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan program-program dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4

Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 2

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	2.005.868.435,00
2	Program Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial	1.278.351.675,00
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Partipasi Masyarakat	68.876.824,00
4	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	382.708.950,00
5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	1.237.612.055,00
6	Program Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	1.072.032.000,00
7	Program Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	991.572.500,00
8	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	584.004.700,00
9	Program Pencegahan Dan Penanganan Konflik Sosial	391.830.000,00



10	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	887.953.730,50
	Jumlah	8.900.810.869,50

3. Untuk mencapai tujuan 3 “Mewujudkan kerukunan, keamanan dan ketertiban umum” telah ditetapkan program-program dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5

Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 3

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	26.331.000,00
2	Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan	218.639.000,00
3	Program Layanan Non Perizinan	201.805.257,00
4	Program Layanan Perizinan	155.546.400,00
5	Program Pengembangan Etika Dan Budaya Politik	35.680.000,00
6	Program Penegakan Peraturan Daerah	222.150.000,00
7	Program Penanaman Modal	730.967.750,00
8	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Ham	93.240.000,00
9	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	261.810.000,00
10	Program Kesatuan Bangsa	349.683.000,00
11	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	1.609.412.000,00
12	Program Penyempurnaan Dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	172.310.000,00
	Jumlah	4.077.574.407,00



4. Untuk mencapai Tujuan 4 “Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan” telah dianggarkan program sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 4

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Perencanaan Dan Pengendalian Jaringan Jalan	1.202.665.100,00
2	Program Lingkungan Sehat Kawasan Permukiman	16.173.376.200,00
3	Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	403.734.500,00
4	Program Pembangunan Jalan Dan Infrastruktur Pendukung	33.464.219.515,00
5	Program Pembangunan, Pembinaan Dan Pengaturan Bangunan Gedung	13.211.005.499,00
6	Program Pengembangan Sarana & Prasarana Fasilitas Perhubungan	1.389.113.000,00
7	Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan	1.713.699.650,00
8	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	210.872.554.895,00
9	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	902.585.000,00
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi	57.495.788.600,00
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.334.637.276,00
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	778.375.460,00
13	Program Pengembangan Perumahan	3.501.370.320,00
14	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	6.098.175.674,00
15	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.125.807.772,00
16	Program Pengamanan Lalu Lintas	4.912.477.000,00
17	Program Penataan Lingkungan Hidup	3.035.285.100,00



No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
18	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	513.660.000,00
19	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	832.945.000,00
20	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	495.698.300,00
21	Program Perencanaan Dan Pengembangan Irigasi	27.019.329.881,00
22	Program Pembinaan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup	248.870.510,00
23	Program Perencanaan Tata Ruang	573.722.617,00
24	Program Tanggap Darurat Bencana	1.050.555.000,00
25	Program Pemeliharaan Jalan Dan Infrastruktur Jalan	46.023.219.530,00
Jumlah		440.372.871.399,00

5. Untuk mencapai tujuan 5 “Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif” telah ditetapkan program dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.7

Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 5

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Penelitian Dan Pengembangan	1.330.965.360,00
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.976.674.230,00
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	851.712.490,00
4	Program Optimalisasi Fasilitas Reformasi Birokrasi	1.404.736.425,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	57.901.531.400,00
6	Program Peningkatan Pajak Daerah	2.040.379.856,50



No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
7	Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	4.940.773.054,60
8	Program Perencanaan Sosial Budaya	647.235.864,00
9	Program Perumusan Kebijakan Dan Fasilitasi Bidang Perekonomian	583.903.000,00
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Kecamatan	36.112.217.415,75
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	25.015.000,00
12	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	717.753.896,50
13	Program Fasilitasi Dan Pembiayaan	169.708.440,00
14	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	3.546.779.182,20
15	Program Pembinaan Keuangan Dan Kekayaan Desa	287.374.160,00
16	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	27.761.500,00
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	157.703.468.252,13
18	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.403.319.745,00
19	Program Pengelolaan Manajemen Aparatur	1.398.549.674,00
20	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	1.120.167.300,00
21	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	194.266.500,00
22	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.229.367.888,50
23	Program Pendidikan Kedinasan	1.940.393.273,00
24	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Komunikasi Publik	586.593.020,00
25	Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah	526.550.267,30
26	Program Peningkatan Dan Pengembangan	5.126.500.839,00



No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
	Pengelolaan Keuangan Daerah	
27	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	191.351.045,00
28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	902.790.005,00
29	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	381.422.288,00
30	Program Pengendalian Pengelolaan Data Informasi Dan Pengaduan	184.874.650,00
31	Program Pengeolaan Aplikasi Informatika	4.990.171.240,00
32	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	1.651.800.100,00
33	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3.048.693.500,00
34	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.091.174.000,00
35	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	4.747.334.425,00
36	Program Penataan Administrasi Kependudukan	266.936.600,00
37	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	38.930.308.741,83
38	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Perlengkapan	2.070.648.837,50
39	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.470.372.186,30
40	Program Kearsipan	848.341.000,00
41	Program Perpustakaan	806.430.000,00
42	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	488.190.000,00
43	Program Kemetrolagian Legal	305.256.000,00
44	Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai	1.605.005.000,00



No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
45	Program Otonomi Daerah Dan Kewilayahan	943.499.112,00
46	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3.494.113.700,00
47	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	663.409.400,00
Jumlah		352.875.819.864,11

6. Untuk mencapai tujuan 6 “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas” telah ditetapkan program dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.8

Daftar Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk Tujuan 6

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Keluarga Berencana Dan Pengendalian Penduduk	8.916.055.837,00
2	Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dan Penggerakan	466.382.504,00
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.019.330.309,00
4	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas	824.872.000,00
5	Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	9.022.429.498,00
6	Program Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sltp	32.649.702.982,80
7	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Bangil	5.361.344.995,13
8	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Beji	5.129.584.221,04
9	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Grati	5.743.475.659,97
10	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri	6.940.343.235,12



No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
	Di Wilayah Kecamatan Gempol	
11	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Gondangwetan	3.954.863.360,58
12	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Kejayan	5.256.252.470,08
13	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Kraton	5.605.701.882,22
14	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Lekok	4.332.042.196,08
15	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Lumbang	3.067.413.249,28
16	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Nguling	4.804.609.408,24
17	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Pandaan	7.115.452.279,48
18	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Pasrepan	4.070.707.227,28
19	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Pohjentrek	2.214.692.042,47
20	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Prigen	4.846.347.887,61
21	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Purwodadi	5.377.260.038,34
22	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Purwosari	5.345.228.904,89
23	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Puspo	2.679.923.533,97
24	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Rejoso	2.891.933.548,39
25	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Rembang	4.401.840.692,96
26	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri	5.005.463.282,72



No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
	Di Wilayah Kecamatan Sukorejo	
27	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Tosari	2.105.205.972,44
28	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Tukur	3.380.280.752,42
29	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Winongan	3.159.992.679,43
30	Program Pelaksanaan Bos Sd Negeri Di Wilayah Kecamatan Wonorejo	4.083.773.734,25
31	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	576.404.000,00
32	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Uptd Rsud	21.913.669.450,00
33	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	20.944.599.000,00
34	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan	344.188.500,00
35	Program Pendidikan Non Formal	3.834.565.500,00
36	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	10.184.553.454,00
37	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	13.250.142.286,00
38	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	153.496.495,00
39	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	4.471.672.057,00
40	Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat	1.166.152.400



No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Uptd Puskesmas	113.638.643.723,11
42	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Blud	162.603.062.991,64
43	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	7.663.990.000,00
44	Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	15.983.440.000,00
45	Program Pendidikan Berkarakter	318.564.500,00
46	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	235.607.000,00
47	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	675.879.850,00
48	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	213.820.000,00
49	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	555.302.640,00
50	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.343.069.466
51	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	825.313.766,00
52	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.979.904.500,00
53	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	62.433.971.100,00
JUMLAH		611.082.519.063,94



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai wujud kewajiban Bupati Pasuruan selaku pemimpin daerah dan pengemban amanah masyarakat dalam bertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapai, maka dibuatlah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pedoman penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, yaitu ***“Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing”***. Oleh karena itu hasil penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penyelenggaraan pembangunan yang dijabarkan dalam 24 urusan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib pelayanan non dasar), 6 urusan pilihan, 4 urusan fungsi penunjang pemerintahan, dan 2 urusan fungsi pemerintahan umum telah dipetakan dalam tujuan dan indikator tujuan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2020. Dalam laporan kinerja ini akan disajikan pencapaian tujuan strategis seperti yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:



- Indikator positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaian kerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Indikator negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 mengacu pada Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

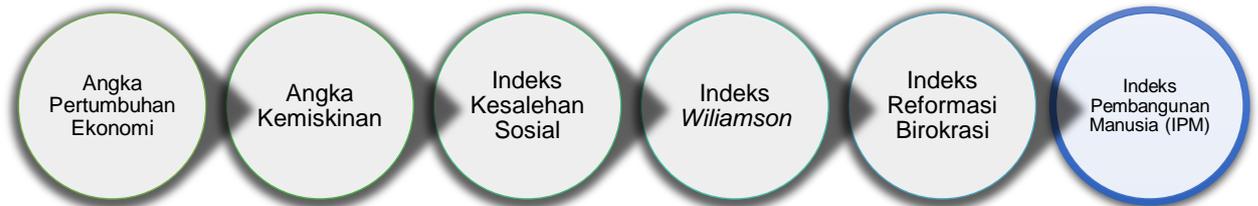
Tabel 3.1

Skala Ordinal Pengukuran Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Berhasil
2.	76% ≤ 90%	Berhasil
3.	66% ≤ 75%	Cukup Berhasil
4.	51% ≤ 65%	Kurang Berhasil
5.	≤ 50%	Tidak Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian tujuan, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Tujuan strategis yang dilaporkan dalam Bab III ini terdiri dari 6 (enam) tujuan sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 yang diukur dalam 6 (enam) indikator kinerja tujuan sebagai berikut:



Pengukuran terhadap kinerja organisasi dilakukan selain dari capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran tingkat efisiensi sumber daya. Tingkat efisiensi sumber daya diukur dengan selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase capaian realisasi anggaran.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan dilaporkan sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomidigunakan indikator *Angka Pertumbuhan Ekonomi* seperti digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,73 - 6	-2,03	-35.43

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,73-6	5,44	5,72	5,79	5,83	-2,03

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,73-6	-2,03	-35,43

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	-2,03	-2,07	+0,04

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Dari tabel 3.2 sampai dengan 3.5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tujuan 1 dalam tahun 2020 disimpulkan **tidak berhasil** dengan capaian menurun sebesar -35,43%, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 5,73-6%, terealisasi sebesar -2,03. Nilai capaian bernilai negative karena adanya perlambatan dan penurunan berbagai sektor akibat pandemi covid 19, dan salah satu yang paling terdampak adalah sektor ekonomi.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020 menurun sebesar 134,82%, dari 5,83% menjadi -2,03%.



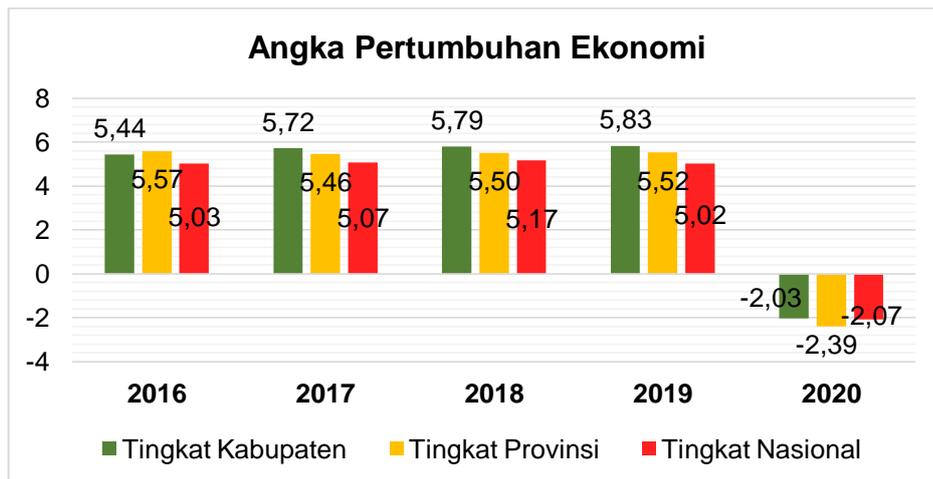
Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023, tingkat kemajuan Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 mengalami perlambatan, dari target tahun 2023 sebesar 5,73-6%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,03%, jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,83%. Yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Namun, Perlambatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan masih lebih baik di bandingkan nasional sebesar -2,07 % dan Provinsi Jawa Timur sebesar - 2,39 %.

Perkembangan Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan *trend* yang meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Tahun 2016 sebesar 5,44% meningkat menjadi 5,72% pada tahun 2017, selanjutnya meningkat lagi setiap tahun sampai dengan tahun 2019, masing-masing menjadi 5,79% pada tahun 2018 dan 5,83% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 angka pertumbuhan ini mengalami penurunan sangat drastis menjadi -2,03%.

Gambaran Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Metode Baru Tahun Dasar 2010
Tahun 2016 – 2020



Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar -2,03% lebih tinggi sebesar 0,36 bila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar -2,39%, dan bila dibandingkan dengan tingkat Nasional juga lebih tinggi sebesar 0,04 dari realisasi sebesar -2,07%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan termasuk penyumbang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dalam wilayah Provinsi Jawa Timur maupun tingkat Nasional.

Hal utama yang berperan dalam mendorong pencapaian Angka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan kinerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Urusan Pertanian

a. Peningkatan produksi tanaman pangan

Persentase peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2020 adalah sebesar 8,09% capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,4% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 2.022,50%.



Produksi padi pada tahun 2020 sebesar 909.810 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 906.687 ton, Produksi jagung pada tahun 2020 sebesar 392.083 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 388.389 ton. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Luas panen pada kedua komoditas tersebut. Adanya bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan alat mesin pertanian, Sekolah Lapang pengendalian Hama Terpadu, pembangunan jaringan irigasi tersier dan sumur bor merupakan alasan kenaikan produksi tanaman pangan.

b. Peningkatan produksi tanaman buah tahunan

Persentase peningkatan produksi tanaman buah tahunan tahun 2020 adalah sebesar 0,48%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,4% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 120%.

Produksi apel pada tahun 2020 sebesar 290.632 ton meningkat 0,33% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 289.688 ton, produksi durian pada tahun 2020 sebesar 107.332ton meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 107.215 ton,dan produksi mangga pada tahun 2020 sebesar 247.5360 ton, meningkat 0,62% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 246.010 ton. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan luas panen dan produktivitas pada ketiga komoditas tersebut. Keberhasilan pembuahan diluar musim (*Off session*) pada tanaman mangga, bantuan bibit mangga dan durian yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan, bantuan pupuk organik pada tanaman apel serta kestabilan harga durian yang membuat petani durian termotivasi membudidayakan tanaman durian secara intensif merupakan alasan kenaikan produksi tanaman buah tahunan.

c. Peningkatan produksi tanaman sayur



Pada tahun 2020 peningkatan produksinya ditargetkan sebesar 0,4% terealisasi sebesar 0,56%. Capaian ini telah jauh melampaui dari target sebesar 0,4% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 140%.

Produksi kentang pada tahun 2020 sebesar 230.332 ton meningkat 0,69% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 228.757 ton dan produksi paprika pada tahun 2020 sebesar 9.490 ton meningkat 0,43% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 9.448 ton. Peningkatan produksi utamanya didukung oleh peningkatan luas panen pada kedua komoditas tanaman sayuran. Peningkatan luas panen disebabkan bantuan benih unggul bersertifikat pada tanaman kentang serta penggunaan sistem irigasi tetes (*Drip Irrigation*) pada tanaman paprikadan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan.

d. Peningkatan produksi tanaman hias

Persentase peningkatan produksi tanaman hias tahun 2020 adalah sebesar 0,36%, Secara umum produksi bunga krisan dan bunga sedap malam meningkat namun capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yaitu sebesar 0,4% atau capaian kinerjanya sebesar 90%.

Produksi bunga krisan pada tahun 2020 sebesar 94.338.476 tangkai meningkat 0,67% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 93.752.963 tangkai dan produksi bunga sedap malam pada tahun 2020 sebesar 90.129.769 tangkai meningkat 0,04% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 90.091.503 tangkai. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan pembatasan kegiatan yang ada di masyarakat sehingga permintaan pasar terhadap tanaman hias juga menurun.



Penurunan permintaan pasar inilah yang mengakibatkan minat petani untuk menanam tanaman hias juga menurun sehingga secara otomatis produksi tanaman hias juga belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

e. Peningkatan produksi tanaman perkebunan

Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan tahun 2020 dibanding tahun 2019 adalah sebesar 0,99%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,4% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 247,50%.

Produksi kopi pada tahun 2020 sebesar 1.380,34 ton meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 1.365,43 ton, produksi cengkeh pada tahun 2020 sebesar 372,73 ton meningkat 1,38% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 367,65 ton, produksi tebu pada tahun 2020 sama dengan produksi tahun 2019 yaitu 24.299,93 ton, dan produksi kelapa pada tahun 2020 sebesar 2.657,62 ton meningkat 0,52% dibandingkan tahun 2019 dengan produksi sebesar 2.643,76 ton. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan Luas panen pada keempat komoditas unggulan sebagai output dari bantuan bibit secara kontinyu, kegiatan peremajaan tanaman kelapa secara kontinyu yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Pasuruan, sekolah lapang pengendalian hama terpadu serta bimtek cara budidaya tanaman perkebunan, sarana prasarana pendukung budidaya dan penanganan pasca panen kopi yang dilakukan secara intensif serta peningkatan SDM petani melalui pembinaan dan pelatihan kepada kelompok tani.

f. Peningkatan produksi peternakan

Peningkatan Produksi Peternakan ditentukan oleh adanya peningkatan populasi ternak baik ternak besar dan kecil:



- 1) Produksi daging pada tahun 2020 adalah sebesar 26.215,056 ton, produksi pada tahun 2019 adalah sebesar 26.169,316 ton, ada kenaikan sekitar 0,17 %. Hasil ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 sebesar 2,15%. Kenaikan produksi daging yang tidak signifikan ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada permintaan daging, khususnya daging sapi, domba, kambing, dan ayam potong.
- 2) Produksi Telur pada tahun 2020 adalah sebesar 16.630,636 ton, produksi pada tahun 2019 adalah sebesar 16.601,094 ton, ada peningkatan 0,18%. Hasil ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 sebesar 3,3%. Hal tersebut disebabkan produksi telur yang belum optimal dengan adanya peremajaan induk petelur.
- 3) Produksi Susu pada tahun 2020 adalah sebesar 108.663,279 ton, produksi pada tahun 2019 adalah sebesar 108.641,551 ton, berarti ada peningkatan produksi 0,02%. Hasil ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 sebesar 2,15%. Hal ini disebabkan meningkatnya populasi sapi perah dan kambing belum diikuti peningkatan produktivitas ternak, karena peningkatan populasi terjadi pada ternak dara sehingga belum dapat menghasilkan susu.

Produk pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan perlu distandarisasikan sebagai jaminan atas mutu produk yang dihasilkan. Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 produk pertanian/agribisnis yang terstandarisasi adalah sebesar 36%. Capaian dari indikator ini adalah sebesar 100% dengan telah terstandarisasinya komoditas padi, kopi, buah dan sayur dari lembaga sertifikasi organik seloliman (LeSOS). Sertifikasi organik ini

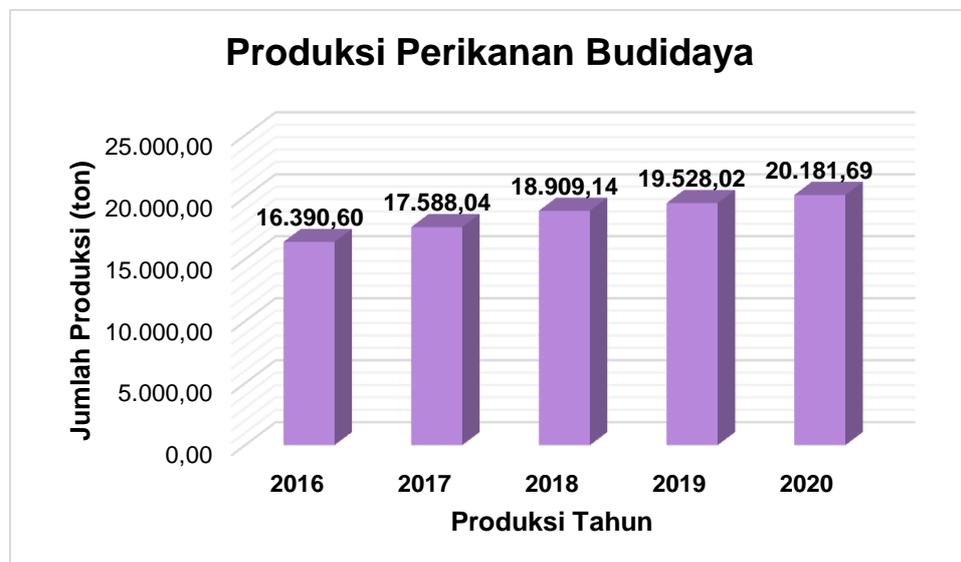
merupakan sarana untuk memberikan jaminan bahwa produk organik memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar melalui kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik.

2. Urusan Perikanan

a. Peningkatan produksi perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya tahun 2020 mencapai 20.181,69 ton atau lebih tinggi 653,67 ton atau 3,35% dibanding tahun 2019 sebesar 19.528,02 ton. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 5% atau 19.854,60 ton telah tercapai 101,6%. Perkembangan produksi perikanan budidaya Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pasuruan
Tahun 2016 – 2020



Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan

Dari grafik dapat dilihat bahwa selama 5 tahun produksi perikanan budidaya menunjukkan *trend* yang positif (meningkat). Peningkatan produksi perikanan budidaya ini menunjukkan bahwa pengembangan program dan kegiatan pada usaha perikanan budidaya air tawar dan air payau di beberapa wilayah cukup



berhasil dalam meningkatkan hasil perikanan budidaya. 9 Peningkatan teknologi budidaya, sarana prasarana produksi dan produktivitas budidaya perikanan serta peningkatan SDM pelaku usaha perikanan budidaya merupakan faktor pendukung dari peningkatan produksi perikanan budidaya.

b. Peningkatan produksi perikanan tangkap

Dari produksi perikanan tangkap tahun 2020 mencapai 22.020,40 ton. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2020 tidak memenuhi target sebesar 95,80% dari yang ditetapkan yaitu 22.985,76 ton. Jika dibandingkan dengan realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2019 yang mencapai 23.556,90 ton terjadi penurunan hasil produksi 6,52% atau sebesar 1.536,10 ton. Penurunan produksi perikanan tangkap tahun 2020 ini disebabkan adanya pandemi covid-19 menyebabkan kemampuan beli BBM nelayan turun sehingga tidak melaut. Selain itu karena rendahnya serapan pasar ikan dan harga ikan turun. Khususnya untuk rajungan karena tidak dapat ekspor karena covid-19 jadi permintaan untuk perusahaan turun, otomatis harga rajungan turun drastis hampir 50%. Produksi perikanan tangkap memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan sebesar 54,68%.

Perkembangan produksi perikanan tangkap Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.3
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pasuruan
Tahun 2016 – 2020



Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan

Pada tahun 2020 jumlah pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan) yang sudah terdaftar sebanyak 14.069 orang, dan jumlah pelaku usaha perikanan yang mandiri sebanyak 623 orang atau sebesar 4,43%. Capaian ini lebih besar 152 orang dari yang ditargetkan yaitu 471 orang atau 3,35%.

3. Urusan Perdagangan

a. Peningkatan nilai transaksi perdagangan

Pada tahun 2020 nilai transaksi perdagangan sebesar Rp.4.192.630.500,00 atau 483,53% dari target sebesar Rp.867.085.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 113,42% dari nilai sebesar Rp.1.964.493.500,00.

Hasil perolehan transaksi berasal dari omzet pelaksanaan pameran yaitu pasar murah, gelar produk, misi dagang dan promosi dagang, baik lokal, regional, dan nasional. Berikut



kegiatan pasar murah, gelar produk, misi dagang dan promosi dagang Tahun 2020.

Tabel 3.6
Kegiatan Pasar Murah, Gelar Produk, Misi Dagang, dan Promosi Dagang Tahun 2020

No.	Pameran Lokal	Tanggal	Tempat
1	Misi Dagang Provinsi Jatim	4-6 Maret 2020	Riau – Sumatera
2	Pameran Gelar Kriya Dekranasda Provinsi Jatim ke-2 Tahun 2020	4-8 Maret 2020	Grand City – Surabaya
3	Pameran Lomba Burung Berkicau Tingkat Nasional	8 Maret 2020	Pandaan - Pasuruan

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan

4. Urusan Perindustrian

Pada tahun 2020 nilai produksi sektor industri yang memiliki target sejumlah Rp63.318.425,34 belum dapat diketahui jumlah produksi sektor industri yang terealisasi. Hal ini dikarenakan Data Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020 masih belum dikeluarkan atau masih dalam tahap rekomendasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

5. Urusan Pariwisata

a. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah wisatawan yang berkunjung tahun 2020 tercatat sebanyak 1.431.668 orang, artinya angka tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan sebanyak 46,67% dibandingkan kunjungan wisatawan di tahun 2019 dengan jumlah wisatawan 2.687.987 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk tidak berpergian dan mengunjungi obyek-obyek wisata.



Rincian jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dan tahun 2019 menurut obyek wisata sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rincian Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Obyek Wisata
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan 2020

No.	Obyek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	
		2019	2020
1	Taman Safari	746.923	139.401
2	Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	146.705	236.662
3	Kebun Raya Purwodadi	128.680	30.661
4	Pemandian Alam Banyu Biru	107.500	7.598
5	Air Terjun Kakek Bodoh	81.802	22.250
6	Air Terjun Putuk Truno	.618	23.417
7	The Taman Dayu City of Festival	65.759	19.739
8	Kaliandra Sejati	22.346	8.278
9	Danau Ranu Grati	10.810	14.390
10	Makam Mbah Segoropuro	82.371	23.078
11	Bukit Flora	10.453	3.580
12	Candi Jawi	31.473	5.415
13	Mbah Semendhi	90.872	26.645
14	Candi Indrokilo	4.611	2.412
15	Candi Sepilar	8.867	4.232
16	Candi Laras	8.797	4.851
17	P.Cungrang	1.327	2.628
18	Candi Gunung Gangsir	2.340	4.125
19	Peteirtaan Belahan	9.701	6.463
20	Makam Mbah Ratu Ayu	98.160	25.807
21	Wisata Edukasi Alam Batik	3.668	4.407
22	Wisata Tas Rajut Kaboki	15.785	5.986
23	Tretes Tree Top	9.994	4.008
24	Saygon Waterpark	32.066	10.393
25	Finna Golf	3.567	9.258
26	Bhakti Alam	85.782	25.196
27	The Taman Dayu Club & Golf Resort	19.406	5.560
28	Kebun Kurma	137.616	18.798
29	Kebun Pak Budi	7.771	4.608
30	Pemandian Duren Sewu Pandaan	62.835	98.909
31	Pemandian Taman Ria Suropati	66.774	18.938
32	Kawasan Wisata Cheng Hoo	506.948	143.918



33	Cimory	67.795	163.243
34	ICC	1.865	2.218
35	Bromo Fores Area	-	2.531
36	Red Flower	-	21.281
37	Pintu Langit Prigen	-	75.492
Jumlah		2.687.987	1.246.376

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

Berikut rincian jumlah kunjungan hotel Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020.

Tabel 3.8

Rincian Jumlah Kunjungan Hotel Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No.	Hotel	Jumlah Pengunjung Hotel
1	Surya Hotel & Cottages	14.981
2	Inna Tretes Hotel	8.074
3	Baobab	10.709
4	Saygon Inn	10.458
5	Taman Dayu Golf & Resort	8.049
6	Tanjung Plaza	12.005
7	Grand Anugrah	12.022
8	Kalimas	9.863
9	Hotel Royal Senyur	9.720
10	Hotel Dalwa	10.610
11	Kaliandra Eco Resort	9.969
12	Hotel Plataran Bromo	10.836
13	Hotel Royal Tretes View	11.337
14	Pinnes Grden Hotel	10.063
15	Finna Golf & Country Resort	13.287
16	Bromo Cottage	11.614
17	Tretes Raya Hotel	11.715
Jumlah		185.132

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

- b. Peningkatan Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang terstandarisasi

Standarisasi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa komponen yaitu toilet bersih, ruang



laktasi, fasilitas untuk disabilitas, klinik/poli, pelayanan prima, dan penerapan sapta pesona.

Pada tahun 2020 realisasi jumlah ODTW yang terstandarisasi mencapai 33% dari target yang sebelumnya ditentukan sebesar 12 ODTW, untuk ODTW yang mendapatkan standarisasi yaitu Banyubiru, Bromo *Forest Area*, Kebun Raya Purwodadi, dan Air Terjun Kakek Bodo. Sedangkan di tahun 2019 terdapat 7 ODTW yang terstandarisasi yakni Taman Sari Indonesia II, Taman Dayu, Finna Golf, Cimory, *Saygon Water Park*, Bakti Alam, Kebun Pak Budi. Tidak tercapainya target jumlah ODTW yang tersandarisasi di tahun 2020 ini disebabkan karena seluruh obyek daya Tarik wisata mengalami penutupan sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2020 akibat adanya pandemi Covid-19.

c. Peningkatan Jumlah pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi.

Pada tahun 2020 selama pandemi covid-19, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak melaksanakan sertifikasi usaha jasa pariwisata tetapi melaksanakan kegiatan berupa pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan pemandu wisata dan warisan budaya dengan peserta 40 orang;
2. Pelatihan tatakelola destinasi dengan peserta 40 orang;
3. Pelatihan homestay dengan peserta 40 orang.

6. Urusan Koperasi dan UMKM

a. Peningkatan jumlah omset usaha mikro dan koperasi

Jumlah omset usaha mikro dan koperasi tahun 2020 mengalami peningkatan dari omset pada tahun 2019 sebesar Rp.20.510.289.385,00 yaitu dari Rp.1.697.507.779.000,00 menjadi Rp.1.718.018.068.385,00.

b. Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas



Indikator jumlah koperasi yang berkualitas tahun 2020 terealisasi sebesar 249 unit yang berarti terdapat peningkatan sebanyak 70 unit dari tahun 2019 sejumlah 179 unit.

c. Peningkatan masyarakat yang berkoperasi

Meningkatnya masyarakat yang berkoperasi pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,53% untuk jumlah anggota koperasi dibandingkan jumlah masyarakat yang ber-KTP. Capaian tersebut meningkat 0,66% dibandingkan dengan tahun 2019.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

a. Peningkatan Desa Mandiri

Meningkatnya jumlah Desa Mandiri tahun 2020 sebanyak 2 (dua) desa dari 341 (tiga ratus empat puluh satu) desa di Kabupaten Pasuruan. Capaian Kinerja untuk Prosentase Desa Mandiri untuk Tahun 2020 sebesar 1,17%. Pencapaian ini sudah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,88%. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

b. Peningkatan Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Mandiri

Jumlah BUMDes yang sudah terbentuk sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 168 unit atau sebanyak 49% dari 341 Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 120 unit. Dari 168 unit BUMDes yang ada dan akhir terdapat 50 unit yang sudah mandiri. Tahun 2020 BUMDes



mandiri telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 3%, yakni terealisasi 29,76%.

c. Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang aktif

Pada tahun 2020 jumlah kelembagaan masyarakat desa yang aktif sebanyak 61 unit dari 341 unit LPM atau sebesar 17,89%. Capaian untuk indikator kinerja adalah 17,89% telah melebihi target yang ditentukan sebesar 7%.

d. Pemerintah Desa yang Berkualitas

Pada tahun 2020 jumlah desa yang memiliki kinerja pemerintahan desa yang baik yaitu sebanyak 9 Desa dibanding dengan jumlah desa maju sebesar 48 desa. Prosentase capaian kinerja sebesar 18,75 % melebihi target yang ditentukan.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap perwujudan dalam pencapaian Angka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan tujuan kinerja Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Urusan Pertanian

- a. Kegiatan yang bersumber dari DBHCHT tidak dapat dilaksanakan karena *breakdown* kegiatan tidak sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- b. Diterbitkannya Peraturan Bupati Pasuruan nomor 900/424.102/2020 tanggal 1 April 2020 perihal penghematan sementara Belanja Daerah tahun 2020 sehingga banyak kegiatan dari setiap dinas yang ditunda pelaksanaannya

2. Urusan Perikanan

- a. Terdapat pengurangan anggaran (*refocusing*) sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan di lapangan dan beberapa kegiatan (misal bimtek) yang tidak dapat dilaksanakan



- b. Dilakukannya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 yang melibatkan kerumunan, sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan diundur sampai akhir tahun.
 - c. Kurang optimalnya kegiatan pameran karena adanya pandemi Covid-19
 3. Urusan Perdagangan
 - a. Pola kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha mikro kecil menengah belum berjalan optimal
 - b. Kurang optimalnya kegiatan pameran perdagangan yang rutin diadakan dikarenakan pandemi Covid-19
 - c. Pengelolaan sentra IKM dianggap belum optimal untuk menjadi ikon di tiap wilayah
 4. Urusan Pariwisata
 - a. Menurunnya tingkat kunjungan pariwisata secara signifikan akibat pandemi Covid-19
 - b. Diterapkannya kebijakan refocusing anggaran sehingga menjadikan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
 5. Urusan Koperasi dan UMKM
 - a. Kelengkapan administrasi organisasi yang belum lengkap diantaranya SOP, SOM, Renstra. ART/Peraturan Khusus, 16 buku organisasi koperasi
 - b. Kurangnya pemahaman perkoperasian, misalnya tugas dan fungsi pengurus dan pengawas yang masih belum dijalankan dengan benar, dimana keterlibatan anggota dalam berkoperasi masih sebatas pinjaman
 - c. Persaingan koperasi dengan lembaga keuangan non bank (Mekar, Melati, Pinjaman Online) yang sangat ketat
 - d. Kurangnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap peraturan perkoperasian (Misalnya (1) KSP dan KSU yang jumlah calon anggotanya banyak dan melebihi ketentuan 3 bulan, (2) Banyaknya kantor cabang koperasi Provinsi/Nasional yang belum



melaporkan pelaksanaan RAT ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Pasuruan

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Masih rendahnya pemahaman aparat desa terhadap tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Lembaga Ekonomi Desa
 - c. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Desa bagi Pembangunan Desa

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mencapai target Angka Pertumbuhan Ekonomi dalam mewujudkan tujuan kinerja Meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain melalui :

1. Urusan Pertanian
 - a. *Breakdown* kegiatan disesuaikan dengan PMK Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau
 - b. Melakukan penganggaran kembali di tahun 2021 terkait kegiatan-kegiatan yang tertunda di tahun 2020.
2. Urusan Perikanan
 - a. Selektif dalam memilih kegiatan dan undangan yang diikuti
 - b. Melaksanakan kegiatan di lapangan tanpa dukungan anggaran (swadaya dari kelompok pembudidaya)
 - c. Mengoptimalkan kinerja penyuluh perikanan di lapangan
 - d. Melaksanakan gelar produk di lingkungan kantor dengan tetap menggunakan protokol kesehatan
3. Urusan Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Melakukan kegiatan yang melibatkan pihak pengusaha besar dan UKM
 - b. Melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan



- c. Melakukan pengelolaan IKM dengan lebih maksimal
4. Urusan Pariwisata
 - a. Pemberian bantuan berupa BLT pada pelaku pariwisata dan seni untuk membantu memulihkan perekonomian pada sektor pariwisata
 - b. Pengembangan SDM pariwisata pada jasa industri pariwisata dengan menggunakan anggaran Dak non fisik
5. Urusan Koperasi dan UMKM
 - a. Pelatihan dan pendampingan penyusunan SOP, SOM, Renstra, ART/Peraturan Khusus (dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan pada saat pemeringkatan untuk penilaian koperasi berkualitas).
 - b. Penyuluhan/sosialisasi perkoperasian (pada saat RAT, Kenduren Mas, dll), memanfaatkan website/ig dinas untuk edukasi perkoperasian serta monev.
 - c. Mendampingi koperasi untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat pelayanan pinjaman agar anggota mendapatkan kemudahan yang sebanding dengan pelayanan pinjaman online.
 - d. Pengawasan dan Pemeriksaan kelembagaan koperasi, memanfaatkan website/ig dinas untuk edukasi peraturan pengawasan koperasi. memaksimalkan pemanfaatan e-koperasi dalam pengawasan koperasi
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Memberikan Pembinaan secara teknis dan terus menerus kepada Aparat Desa
 - b. Memberikan pembinaan dan memfasilitasi kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa terkait dengan keberadaan Lembaga Ekonomi Desa yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa



- c. Memberikan pembinaan dan memfasilitasi kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa terkait dengan pentingnya pengelolaan SDA dan SDD bagi pembangunan dan ekonomi desa

3.1.2 Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan 2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat digunakan indikator kinerja *Angka Kemiskinan* yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Tujuan 2

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	9,35	9,26	100,97

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	9,35	10,57	10,34	9,45	8,68	9,26

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2 s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	9,20	9,26	99,35%

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan



Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	9,26	9,78	-0,52

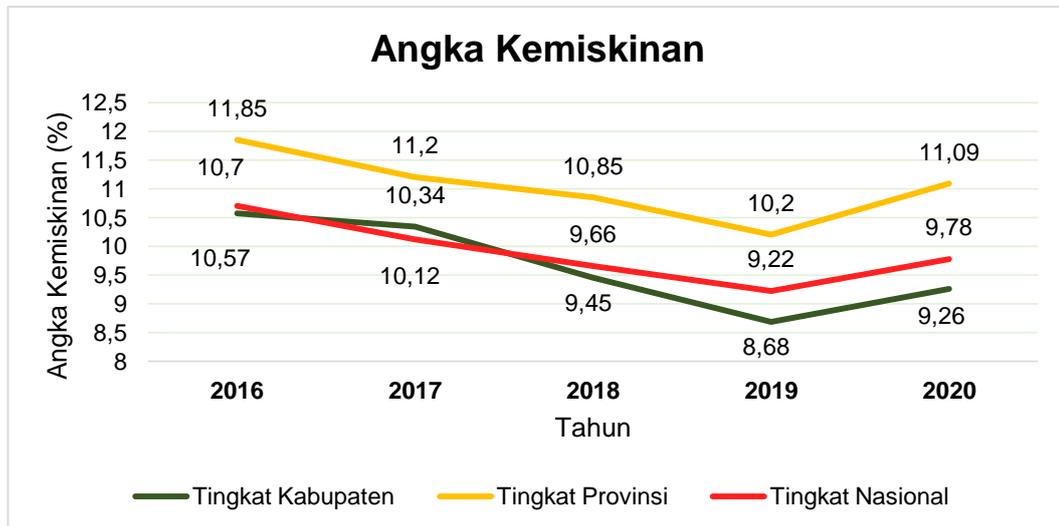
Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Dari tabel 3.9 sampai dengan 3.12 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Tujuan 2 dalam tahun 2020 disimpulkan **berhasil** dengan capaian sebesar 100,97%, dimana angka kemiskinan terealisasi sebesar 9,26% lebih rendah dari target sebesar 9,35%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan naik sebesar 0,58% dari 8,68% menjadi 9,26%, artinya terjadi peningkatan kemiskinan di tahun 2020. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 tingkat kemajuannya 99,35% atau dari target 2023 sebesar 9,20% pada tahun 2020 sudah terealisasi sebesar 9,26%.

Angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 rata-rata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mencapai sebesar 10,57%, kemudian menurun menjadi 10,34% pada tahun 2017. Selanjutnya di tahun 2018 kembali menurun menjadi 9,45% dan terus menurun di tahun 2019 hingga mencapai 8,68%. Akan tetapi pada tahun 2020, angka kemiskinan meningkat menjadi 9,26%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat sehingga banyak masyarakat kalangan bawah yang pendapatannya berkurang bahkan terhenti karena melambatnya kinerja perekonomian daerah.

Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2016-2020 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.4
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016 – 2020



Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Realisasi angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar 9,26% lebih rendah sebesar 1,83% dan sebesar 0,52% bila dibandingkan dengan realisasi angka kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional yang masing-masing terealisasi sebesar 11,09% dan sebesar 9,78%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih baik dibanding rata-rata kemampuan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Timur maupun tingkat Nasional.

Hal utama yang menghambat capaian Angka Kemiskinan untuk mewujudkan tujuan kinerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain :

1. Urusan Sosial

Jumlah PMKS di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebanyak 151.430 orang atau 9,43% dari jumlah penduduk sebanyak 1.605.969 orang. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 141.090 jiwa dari atau sebesar



8,68% dari jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan. Peningkatan jumlah PMKS di tahun 2020 ini karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kalangan bawah yang pendapatannya berkurang bahkan terhenti karena melambatnya kinerja perekonomian daerah.

2. Urusan Tenaga Kerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan sebesar 6,24% mengalami peningkatan 0,82% dari tahun 2019 sebesar 5,42%. Peningkatan ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa penduduk kehilangan mata pencahariannya. Perusahaan belum siap melakukan rekrutmen tenaga kerja, penurunan penyerapan tenaga kerja baik sektor formal atau sektor informal dikarenakan tidak terlaksananya semua program pemerintah yang berbasis masyarakat seperti Program Peningkatan Kerja (penyebarluasan informasi pasar kerja) kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan kegiatan Pelatihan dan Produktivitas yang bertujuan untuk peningkatan *skill*, kompetensi dan sertifikasi pencari kerja, ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (tidak terjadi *link and match*) serta Peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industri yang menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.

b. Penurunan Pencari Kerja yang Ditempatkan

Angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan adalah para calon tenaga kerja yang bekerja dalam institusi pemerintah maupun perusahaan, bekerja di luar negeri sebagai TKI/TKW maupun melakukan wirausaha mandiri.

Keberhasilan penempatan tenaga kerja merupakan wujud keberhasilan suatu daerah dalam menanggulangi pengangguran.



Akan tetapi, di tahun 2020 persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 43,4% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 26,65% dari 70,05%. Dari sekitar 4.238 pencari kerja di tahun 2020, hanya terdapat 1.839 pencari kerja yang ditempatkan. Penurunan pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan pandemi covid-19 yang mengakibatkan permintaan pasar menurun sehingga perusahaan merekrut karyawan secara masif dan dipengaruhi juga oleh kebijakan perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berikut realisasi jumlah pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2018-2020.

Grafik 3.5
Realisasi Pencari Kerja yang Ditempatkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018 – 2020



Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan



c. Peningkatan peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi

Secara berkala pemerintah daerah mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi bagi peserta. Tahun 2020 terdapat penambahan/peningkatan persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi sebesar 75% dibandingkan tahun 2019 sebesar 68,75%. Peserta pelatihan uji kompetensi sebanyak 16 peserta Kejuruan Otomotive Roda Dua diantaranya 12 peserta lulus kompetensi dan 4 peserta belum lulus. Dengan adanya sertifikat kompetensi maka tenaga kerja memiliki daya saing dan mempunyai kesempatan lebih besar mengisi lowongan kerja yang tersedia.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap perwujudan dalam pencapaian Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan Tujuan kinerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain :

1. Urusan Sosial
 - a. Belum validnya data DTKS sehingga PMKS yang seharusnya mendapat bantuan belum masuk dalam DTKS
 - b. Diperlukan dukungan dari semua pihak terkait penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Pasuruan
2. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Dampak dari pandemi covid sehingga Job Fair, May Day 2020 tidak terlaksana
 - b. Adanya UU 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya belum ada
 - c. Refocusing anggaran karena covid-19 sehingga Komponen Pendukung tidak lengkap



Adapun upaya-upaya untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan guna menurunkan Angka Kemiskinan di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Urusan Sosial
 - a. Membuat kebijakan dan percepatan implementasi verifikasi dan validasi data kemiskinan
 - b. Meningkatkan sinergi dari OPD terkait melalui peningkatan kesadaran terhadap penanganan masalah sosial
2. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Pengaturan *schedule* ulang untuk kegiatan yang tertunda di Triwulan I dan II;
 - b. Memyesuaikan surat dari Kementrian Ketenagakerjaan dan BP2MI tentang Proses Pemberangkatan ke Luar Negeri;
 - c. Menunggu Hasil PP dan UU 11 Tahun 2020.

3.1.3 Tujuan 3: Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan 3 Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum digunakan indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja Tujuan 3

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	62,40	76,6	122,76

Sumber data: Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan



Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	62,40	-	-	-	72,21	76,6

Sumber data: Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	67,70	76,6	113,15%

Sumber data: Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	76,60	-	-

Sumber data: Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan

Dari tabel 3.13 sampai dengan 3.16 tersebut di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Tujuan 3 dalam tahun 2020 disimpulkan **Berhasil** dengan tingkat capaian sebesar 122,76%, dimana Indeks Kesalehan Sosial pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 62,40 terealisasi sebesar 76,6. Begitu pula jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD



tahun 2023 sebesar 67,70 tingkat kemajuannya telah mencapai sebesar 113,15%. Indeks Kesalehan Sosial pada tahun 2020 meningkat 4,5 poin dibandingkan pada tahun 2019 dengan skor 72,1.

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 sebesar 76,6 dapat dikategorikan **Baik**. IKS tersebut diperoleh dari hasil kajian/survey yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan melalui dua dimensi penilaian/pembentuknya, yaitu dimensi kepedulian sosial dan dimensi kepedulian lingkungan yang masing dimensi terdiri dari 5 sub dimensi. Skor dimensi kepedulian sosial mendapat skor 41,4 dan skor pada dimensi kepedulian lingkungan sebesar 35,2.

Adapun rincian penghitungan skor Indeks Sosial Kabupaten Pasuruan per masing-masing sub dimensi, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.17
Rincian Skor Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 - 2020

Dimensi	Sub Dimensi	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Skor	Indeks	Skor	Indeks
Kepedulian Sosial	Sikap percaya	8,0	41,2	8,7	41,4
	Toleransi	7,1		7,2	
	Kelompok	9,2		8,3	
	Resiprositas (Solidaritas)	9,7		9,8	
	Aksi Bersama (Kerja sama)	7,2		7,3	
Kepedulian Lingkungan	Penghemat Energi	7,9	30,9	8,5	35,2
	Pengelolaan Sampah	5,8		5,8	
	Penghemat Air	7,6		8,1	
	Pengurangan polusi udara	1,5		5,9	
	Penjagaan lingkungan	8,1		6,9	
Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2019		72,1			
Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2020		76,6			

Sumber data: Data survey Indeks Kesalehan Sosial Kab. Pasuruan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dimensi Kepedulian Sosial mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan menyumbang angka sebesar 41,4 dari nilai maksimal 50. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa dimensi kepedulian sosial berkontribusi cukup besar di



Kabupaten Pasuruan. Hal ini menunjukkan aspek sosial di masyarakat Kabupaten Pasuruan masih terikat erat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.

Adapun dimensi kedua, yakni Kepedulian Lingkungan sama-sama mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu meningkat 4,3 poin serta menyumbang angka sebesar 35,2 dari nilai maksimal 50. Skor dari dimensi lingkungan terpaut 6,2 lebih rendah dibandingkan dengan skor untuk dimensi kepedulian sosial.

Berdasarkan agregat skor sub dimensi IKS, diketahui bahwa terdapat dua sub dimensi yang dirasa perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki skor agregat di bawah enam. Kedua sub dimensi adalah sub dimensi pengurangan polusi udara yang mendapat skor 5,9 dan sub dimensi pengelolaan sampah dengan skor 5,8 yang keduanya merupakan sub dimensi Kepedulian Lingkungan.

Sedangkan terhadap agregat skor indikator penilaian IKS, diketahui bahwa terdapat delapan indikator yang perlu mendapat perhatian karena mendapatkan skor di bawah agregat yaitu dibawah 60 dengan rincian:

- a. Indikator pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dari subdimensi pengurangan polusi udara dengan skor 15,35;
- b. Indikator pemilahan sampah rumah tangga dari sub-dimensi pengelolaan sampah dengan skor 20,23;
- c. Indikator mengenai ketersediaan dibangun tempat ibadah agamain dari sub-dimensi toleransi dengan skor 41,9;
- d. Indikator penggunaan bungkus/tas/plastik/wadah pribadi saat berbelanja dengan skor 43;
- e. Indikator mengenai keterlibatan masyarakat dalam bertindak terkait dengan penjagaan lingkungan dari sub-dimensi penjagaan lingkungan dengan skor 52;
- f. Indikator ketersediaan diselenggarakannya kegiatan agama lain di sekitar tempat tinggal dari sub-dimensi toleransi dengan skor 53,5.



Dengan Skor Indeks Kesalehan Sosial 76,6 yang masih dalam kategori baik, namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih perlu berupaya untuk meningkatkan skor IKS di tahun mendatang. Hal ini disebabkan masih terdapat sejumlah indikator yang mendapat skor di bawah rata-rata.

Hal utama yang mempengaruhi pencapaian kinerja Indeks Kesalehan Sosial dalam rangka mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:

1. Peningkatan pelanggaran Perda yang diselesaikan

Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 738 kasus dibagi dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda sebanyak 801 kasus. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 92,13% sedangkan target yang ditetapkan dalam kinerja sebesar 92% sehingga tingkat pencapaiannya 100,15%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar 91,24% tampak mengalami kenaikan sebesar 0,89%.

2. Peningkatan gangguan trantibum yang diselesaikan

Jumlah gangguan trantibum yang ditangani pengukurannya adalah jumlah gangguan trantibum yang ditangani terhadap jumlah gangguan trantibum, data tersebut diambil dari kriteria dari jenis gangguan trantibum antara lain: unjuk rasa, Gepeng, anak jalanan dan anak punk.

Realisasi jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sebanyak 50 kasus dibagi jumlah gangguan trantibum yang ditangani sebanyak 50 kasus sehingga tingkat pencapaian persentase gangguan trantibum yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 100%. Tingkat pencapaian ini sama dengan tahun 2019 dengan 178 kasus.

3. Tidak adanya potensi konflik SARA

Pada tahun 2020 dan 2019 tidak pernah terjadi konflik SARA di Kabupaten Pasuruan, begitu juga potensi konflik lainnya. Kondisi



tersebut sangat mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:

- a. Kurang tertibnya ormas dalam melaporkan kegiatannya setiap 6 bulan sekali
- b. Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bela negara
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya yang tidak tercapai sesuai target karena anggota Satpol PP yang dilatih melaksanakan penanganan covid dan adanya aturan pelaksanaan kegiatan ini ditangguhkan
- e. Capaian Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat rendah karena terjadinya tumpang tindih penyerapan anggaran antara dana DAU Rutin dan dana BTT sedangkan kegiatan rutin sudah dilaksanakan bersama penanganan covid tetapi menggunakan dana BTT
- f. Program Penegakan Peraturan Daerah tidak tercapai karena adanya hambatan dari perubahan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai *time schedule*
- g. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai tidak tercapai karena aturan sosialisasi ditangguhkan dan adanya tambahan kegiatan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sehingga kegiatan dilaksanakan setelah perubahan anggaran

Adapun upaya untuk mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Pasuruan guna



meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas fasilitasi pemberdayaan ormas
- b. Melakukan kerjasama dengan BNNK dalam penyuluhan pencegahan peyalahgunaan narkoba
- c. Meningkatkan kualitas materi sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara
- d. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bertahap setelah perubahan anggaran dengan membatasi jumlah personil yang dilatih
- e. Penyusunan Surat Keputusan dari pihak yang berwenang sebagai payung hukum selama kegiatan berlangsung dalam 1 hari melaksanakan 2 kegiatan yang berbeda dan dana yang berbeda dengan personil yang sama sehingga tercapai penyerapan anggaran baik dana rutin maupun dana BTT.
- f. Pelaksanaan dilakukan sesuai *time schedule* kegiatan
- g. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai *time shedule* dengan membatasi peserta sosialisasi dan tidak merubah peraturan nomenklatur kegiatan disaat kegiatan berjalan

3.1.4 Tujuan 4 : Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan 4 Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan digunakan indikator kinerja “*Indeks Williamson* (Indeks Kesenjangan Wilayah)” yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.18

Pencapaian Kinerja Tujuan 4

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Wiliamson	0,255	0,277	91,37

Sumber data: Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Wiliamson	0,255	0,2553	0,2546	0,2561	0,2583	0,277

Sumber data: Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4 s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Wiliamson	0,2400	0,277	84,58

Sumber data Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Wiliamson	0,277	-	-

Sumber data: Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan

Dari tabel 3.18 sampai dengan tabel 3.21 tersebut di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Tujuan 4 dalam tahun 2020 disimpulkan **Berhasil** dengan tingkat capaian sebesar 91,37%, dimana



Indeks Wiliamson pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 0,255 terealisasi sebesar 0,277 Begitu juga bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 0,240 tingkat kemajuannya telah mencapai sebesar 84,58%.

Disparitas wilayah Kabupaten Pasuruan sepanjang tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2016 diperoleh indeks disparitas wilayah sebesar 0,2553, tahun 2017 menunjukkan disparitas yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,2546, tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 0,2561 dan 0,2583, dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,277. Namun angka 0,277 masih termasuk dalam kategori ketimpangan yang rendah.

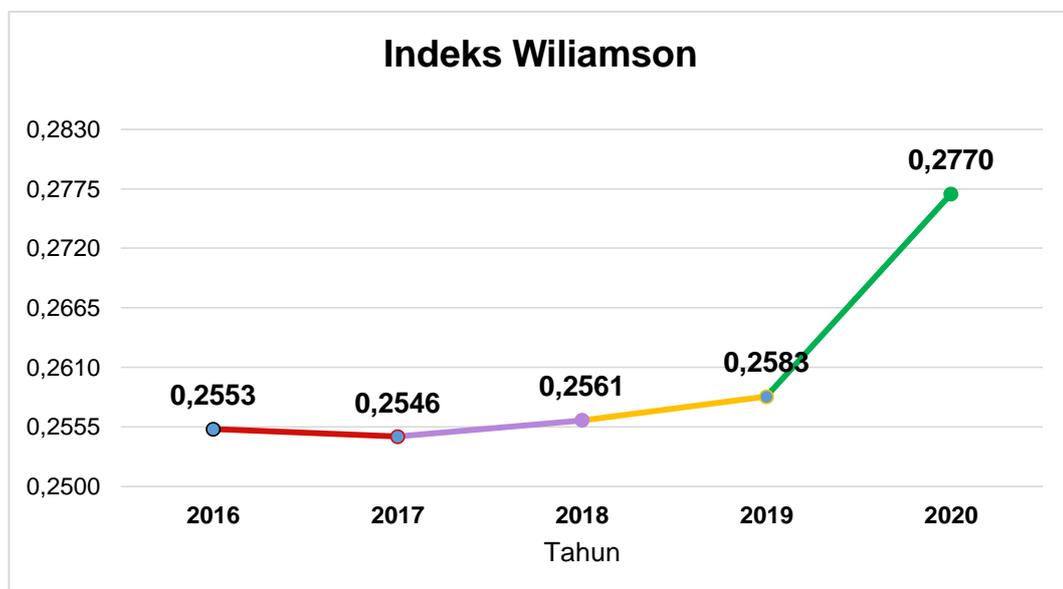
Dari data tersebut menunjukkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pasuruan mengalami perbaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 walaupun terus dilakukan perbaikan melalui kebijakan perencanaan daerah yang pro pemerataan pembangunan masih mengalami pelemahan, namun pelemahannya masih di bawah target tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, ketimpangan wilayah mengalami peningkatan dari tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya pergeseran peningkatan beberapa sektor produktif yang awalnya mengandalkan industri, tetapi setelah adanya covid-19 beberapa sektor justru mengalami pelambatan. Tetapi, secara keseluruhan tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Pasuruan masuk kategori rendah. Kategori rendah ini dapat diartikan bahwasannya sebaran ketimpangan pendapatan di masing-masing kecamatan Kabupaten Pasuruan tergolong merata.

Berbeda halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 faktor yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kabupaten Pasuruan adalah faktor teknologi dan pemasaran. Selanjutnya adalah faktor *skill* dan kemitraan, faktor sumberdaya alam, faktor aksesibilitas, faktor sosial, faktor sumberdaya manusia dan yang terakhir adalah faktor infrastruktur dasar. Kuatnya pengaruh faktor teknologi dan pemasaran

pada tahun 2020 disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk perdagangan *online* sehingga faktor tersebut menjadi hal yang paling mempengaruhi aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Pasuruan.

Perkembangan indeks kesenjangan wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020 dapat ditunjukkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.6
Perkembangan Indeks Wiliamson/Indeks Kesenjangan Wilayah
Kabupaten Pasuruan
Tahun 2016 – 2020



Sumber data: Hasil Kajian/Survey Bappeda Kabupaten Pasuruan

Hal utama yang mempengaruhi capaian Indeks Kesejangan Wilayah/Tingkat aksesibilitas wilayah pada tahun 2020 yang masih dalam kategori rendah, walaupun mengalami peningkatan akibat covid-19 adalah beberapa hal berikut yang berkaitan dalam rangka mewujudkan Tujuan kinerja Terwujudnya Keseimbangan Pengembangan Wilayah, antara lain:

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Bina Marga

- a. Peningkatan Indeks aksesibilitas Wilayah Kabupaten Pasuruan



Tingkat aksesibilitas wilayah diukur berdasarkan pada beberapa variabel yaitu ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan, dan kualitas jalan. Selain itu yang menentukan tinggi rendahnya tingkat akses adalah pola pengaturan tata guna lahan.

Indeks aksesibilitas Kabupaten Pasuruan dihitung menggunakan formulasi :

$$\text{Indeks Aksesibilitas} = \frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan}}$$

Indeks aksesibilitas Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 realisasinya mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,20 menjadi 1,30 atau setiap 1 km panjang jalan melayani 0,77 km² wilayah atau kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada kondisi jalan dan infrastruktur pendukung jalan kondisi baik dan sedang dan wilayah yang terlayani bertambah.

b. Peningkatan Infrastruktur Jalan dalam kondisi baik

Infrastruktur Jalan dalam kondisi baik merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat yang harus terpenuhi karena merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum. Pada indikator ini ditahun 2020 target capaiannya sesuai RPJMD 2020 sebesar 81,23% atau sepanjang 1.881,130 km dari panjang jalan kabupaten keseluruhan sepanjang 2.315,89 km. Pada tahun 2020 dukungan untuk mewujudnya hal tersebut baik dari segi kebijakan maupun pendanaan cukup memadai sehingga diperoleh capaian pada akhir tahun 2020 sebesar 81,23% atau 1.881,130 km, sesuai dengan target kinerja pada RPJMD 2020. Dengan demikian pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,17% atau sepanjang 40 km.

c. Peningkatan Infrastruktur pendukung jalan dalam kondisi baik

Infrastruktur pendukung jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan pada target RPJMD 2018-2023 pada tahun awal 2019



adalah 90% dan pada tahun 2020 target sebesar 91,60% tercapai dengan realisasi 100%. Adapun infrastruktur pendukung jalan dalam hal ini dititik beratkan pada LPJU guna mempermudah dalam pengukuran target dan capaiannya.

Adapun infrastruktur pendukung jalan yang lain meliputi:

1) Jembatan dalam Kondisi Baik

Jembatan merupakan penghubung antar ruas jalan yang berfungsi untuk kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat, jika kondisi jembatan dalam keadaan baik maka mobilitas masyarakat akan lancar yang manfaat bagi masyarakat setempat khususnya dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Target dan capaian indikator ini pada tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22

Kondisi Jembatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No	Kondisi Jembatan	Volume
1.	Baik	325 buah
2.	Sedang	170 buah
3.	Rusak	65 buah
4.	Rusak Berat	23 buah
Jumlah yang ditargetkan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2020 berdasarkan RPJMD 2018-2023		495 buah (84,90%)
Jumlah keseluruhan berdasarkan RPJMD 2018-2023		583 buah

Capaian berdasarkan Renstra = $495 \text{ buah} : 583 \text{ km} \times 100 \% = 84,91 \%$.



Tabel 3.23

Kondisi Drainase Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No	Drainase	Volume
1	Panjang Drainase yang dibutuhkan	384 km
2	Panjang Drainase yang ditargetkan dalam kondisi baik tahun 2020	105,64 km

Capaian berdasarkan Renstra = $105,64 \text{ km} : 384 \text{ km} \times 100 \% = 27,51 \%$

2) Kondisi Turap/Talud/Bronjong dalam kondisi Baik

Turap dibangun di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor bertujuan untuk memperkuat badan jalan dari bahaya longsor. Turap biasanya dibangun pada daerah-daerah pegunungan atau wilayah dataran tinggi dan ruas jalan yang berbatasan langsung dengan sungai, saluran atau laut.

Tabel 3.24

Panjang Turap/Talud/Bronjong Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No	Uraian	Volume
1	Panjang Turap/talud/bronjong yang dibutuhkan pada tahun 2020	953 km
2	Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ada 2020	480,80 km

Capaian berdasarkan Renstra = $480,80 \text{ km} : 953 \text{ km} \times 100 \% = 50,45 \%$.

3) Lampu Penerangan Jalan/Fasilitas Umum

Pemenuhan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu standar pelayanan dan keselamatan transportasi yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam perencanaan pembangunan lima tahun dalam 2014-2019 jumlah kebutuhan Lampu PJU dihitung dari panjang jalan kabupaten 2.315,89 km dan setiap 50 meter panjang jalan dibutuhkan 1 titik LPJU.

Tabel 3.25

Panjang Jalan yang ber PJU Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No	Uraian	Volume
1	Panjang Jalan yang membutuhkan PJU Jalan Kabupaten = 2.315,89 km Jalan Nasional = 88,7 km Jalan Propinsi = 86,65 km Jalan Poros Desa = 56,54 km	2.547,78 km 50.955 titik
2	Panjang Jalan yang sudah ada PJU Jumlah titik lampu yang terpasang	2.335km 46.710 titik

Capaian Renstra : • 2.335km : 2.547,78 km X 100 % = 91,65%

• 46.710 titik : 50.955 titik X 100 %= 91,67%

2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Peningkatan Indeks Ketahanan air

Indeks Ketahanan air merupakan nilai kemampuan untuk menjaga keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan air baku, baik dalam jumlah yang mencukupi serta mutu yang dapat diterima. Pemenuhan kebutuhan air tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan perkembangan sosial-ekonomi; menjamin perlindungan atas pencemaran air dan bencana terkait air; serta melestarikan ekosistem dalam suasana damai dan kondisi politik yang stabil.

Indeks ketahanan air diperoleh dari proporsi antara air baku yang dibutuhkan dengan jumlah ketersediaan air baku yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2020 indeks ketahanan air di Kabupaten Pasuruan realisasinya adalah 77,65% sehingga tercapai 99,96% dari target yang telah ditentukan sebesar 77,68%.

b. Peningkatan ketersediaan dan pemenuhan air baku

Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Berkembangnya Kabupaten Pasuruan yang di iringi penambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan air bersih menjadi



meningkat, sedangkan sumber air bersih menjadi terdegradasi. Sumber air di wilayah Kabupaten Pasuruan di ambil dari mata air Umbulan dan sumber air permukaan yang berasal dari beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari 7 (tujuh) sungai yang bermuara di Selat Madura yaitu:

- 1) Sungai Laweyan: bermuara di Desa Penunggul - Kecamatan Nguling
- 2) Sungai Rejoso: bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
- 3) Sungai Gembong: bermuara di wilayah Kota Pasuruan
- 4) Sungai Welang: bermuara di Desa Pulokerto – Kecamatan Kraton
- 5) Sungai Masangan: bermuara di Desa Raci – Kecamatan Bangil
- 6) Sungai Kedung Larangan: bermuara di Desa Kali Larangan
- 7) Sungai Petrung: bermuara di Kecamatan Kraton

Indikator kinerja persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku di wilayah Kabupaten Pasuruan diperoleh dari persentase perbandingan sumber air baku dalam kondisi baik dengan jumlah sumber air baku keseluruhan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tahun 2020 persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku sebesar 52,58 % atau tercapai 98,51% dari target yang ditentukan.

- c. Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama ketaatan terhadap rencana tata ruang terdapat 3 (tiga) program utama yakni Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang serta Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Khususnya program Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas PU, SDA dan Tata Ruang yang disupport oleh BAPPEDA terkait Kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2020 didapatkan dari



perbandingan luas wilayah yang sesuai peruntukan yaitu sebesar 15.172,40 Ha sedangkan total rencana peruntukan dari 8 BWP tersebut adalah sebesar 25.287,34 sehingga didapatkan angka 60% dan hal ini berarti sesuai dengan yang diharapkan mencapai 60% atau tercapai 100%.

3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar 80,01 meningkat sebesar 22,63 bila dibandingkan dengan tahun 2019. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah indeks pencemaran air (Indeks Kualitas Air), indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan, dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan dengan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta pelaku usaha. Pada tahun 2020 realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Pasuruan sebesar 98,59 dengan capaian kinerja sebesar 168% dari target yang ditentukan sebesar 58,67.
- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di wilayah Kabupaten Pasuruan. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara



tahunan. Pada tahun 2020 nilai untuk Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Pasuruan adalah 82,22 poin dengan target capaian adalah sebesar 82,25 poin sehingga tingkat pencapaiannya sebesar 99,96%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2019 yakni 78,83 poin.

- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sangat dipengaruhi oleh luas tutupan lahan. Luas tutupan lahan total adalah dengan menjumlahkan luasan tutupan hutan, belukar dan semak belukar, hutan kota, kebun raya, taman kota dan RTH kabupaten. Target IKTL Tahun 2020 sebesar 43,64 poin dan realisasi sebesar 44,04 poin dengan capaian sebesar 100,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 (43,89 poin) mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin.
- 4) Peningkatan Nilai TPA (Program Adipura)

Nilai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu pendukung penilaian Program Adipura Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam tahun 2020 diwujudkan dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan;
- 2) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan;
- 3) Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan;
- 4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dan;
- 5) Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Pembangunan/ Penyediaan TPA).



Pada tahun 2020 realisasi Nilai TPA Kabupaten Pasuruan adalah 79 poin melebihi target yang telah ditentukan yakni 78 poin maupun standar nilai program adipura sebesar 76 poin sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Pasuruan memperoleh Penghargaan Adipura untuk kesekian kalinya.

b. Program SDSB

Program SDSB di Kabupaten Pasuruan yang digulirkan sejak tahun 2018 melalui Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan suatu kebijakan terobosan baru untuk mengatasi permasalahan sampah, oleh karena itu agar tujuan Kabupaten Pasuruan menjadi Kabupaten Sehat, bersih dan indah oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018 – 2023 diprioritaskan menjadi program unggulan dengan jargon SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah). Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan sampah melalui Jargon SDSB ini dimaksudkan sebagai berikut:

- 1) Agar setiap desa/kelurahan segera melakukan program pengelolaan sampah;
- 2) Sampah dapat berkurang dan terpilah dari sumbernya;
- 3) Mengubah mindset (pola pikir) masyarakat peduli terhadap sampah;
- 4) Menambah pendapatan masyarakat dan menjadi sumber daya.

Sedangkan Tujuan Program Prioritas Unggulan SDSB adalah untuk meningkatkan tata kelola sampah sehingga lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman untuk mendukung Program Kabupaten Pasuruan Sehat dan bebas sampah tahun 2025.

4. Urusan Kebencanaan Daerah

a. Penurunan Indeks Rawan Bencana (IRB)

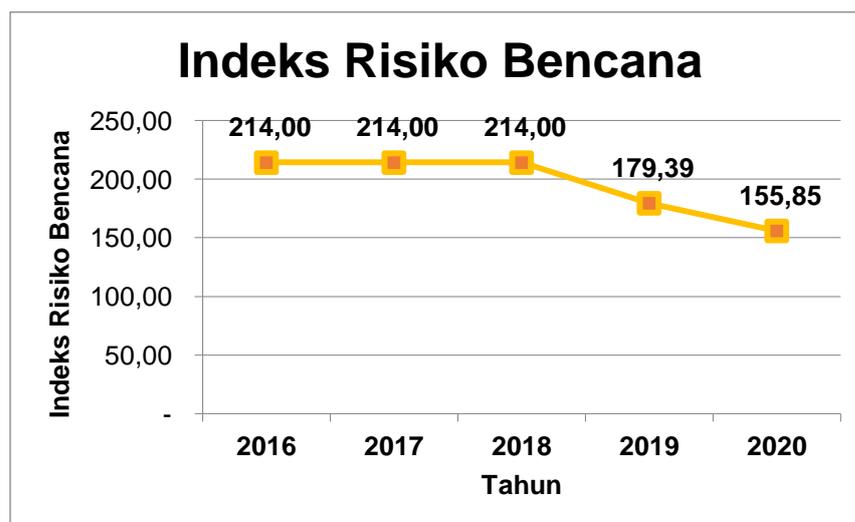
Perhitungan Indeks Rawan Bencana (IRB) diperoleh dari dampak korban jiwa (meninggal dan luka-luka) dan kerusakan (rumah dan



fasilitas/infrastruktur) serta kepadatan penduduk. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dengan berkembangnya metoda dan pengkajian risiko bencana, maka dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia ini telah menggunakan parameter-parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana. Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang mempunyai indeks risiko bencana tertinggi nomor 2 di Provinsi Jawa Timur.

Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019 sebesar 179,39 dengan kelas risiko tinggi, sedangkan Indeks Risiko Bencana pada Tahun 2020 turun menjadi 155,85, namun masih dalam kategori level ancaman kelas risiko tinggi, sehingga perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

Grafik 3.7
Perkembangan Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Pasuruan
Tahun 2016 – 2020



Sumber data: BPBD Kabupaten Pasuruan

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya berikut uraian waktu dan lokasi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan selama Tahun 2020 sebagai berikut.

- a) Bencana Banjir
- b) Bencana Tanah Longsor
- c) Angin Puting Beliung
- d) Bencana Rawan Air Bersih
- e) Bencana Kebakaran Hutan

- b. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis



masyarakat dengan meningkat-kan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Jumlah desa tangguh bencana berkategori utama sampai tahun 2020 di Kabupaten Pasuruan mencapai 10 desa atau sebesar 12,50% dari desa/kelurahan yang masuk dalam kriteria rawan bencana. Capaian tersebut sudah melebihi target tahun 2020 yaitu 8 Desa (atau sebesar 10%). Kesepuluh desa tersebut yaitu: Desa Kedawungkulon, Desa Tambakrejo, Desa Ledugm Desa Paturguran, Desa Sukorejo, Desa Tambakan, Desa Prodo, Desa Sidogiri, Desa Sadengrejo, dan Desa Bandaran.

- c. Pada tahun 2020 terdapat korban yang terdampak bencana



sebesar 265.144 jiwa meliputi bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan kekeringan. Adapun capaian untuk korban

bencana yang tertangani sebesar 265.144 jiwa, sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- d. Pada tahun 2020 terdapat rumah yang terdampak bencana

sebesar 85 rumah akibat bencana meliputi bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan musibah kebakaran. Adapun capaian untuk pemulihan rumah akibat dampak bencana



yang tertangani sebesar 85 rumah, sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap perwujudan dalam pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan Tujuan kinerja Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, antara lain :

1. Urusan Pekerjaan Umum Bina Marga
 - a. Diperlukannya dokumen induk perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas PU Bina Marga yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasuruan;



- b. Kurangnya arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas PU Bina Marga dalam jangka menengah atau 5 tahun periode pembangunan;
 - c. Kurangnya pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang lebih operasional selama 5 (lima) tahun.
2. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- a. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air
 - b. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
 - c. Belum optimalnya pengurangan daerah genangan banjir
 - d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan
 - e. Belum optimalnya pelayanan penyediaan rumah layak huni
 - f. Rendahnya penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 - g. Tingginya angka *backlog* perumahan dan rumah tidak layak huni
 - h. Kurangnya pengaturan dan pengendalian pengembangan perumahan swadaya (komersial)
 - i. Rendahnya pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman
3. Urusan Lingkungan Hidup
- a. Pengembangan SDSB Tahun 2020 tidak terpenuhi. Target pengembangan jumlah desa/ kelurahan yang ditargetkan dari 80 desa/kelurahan hanya terealisasi sebanyak 24 desa/ kelurahan dikarenakan adanya ketentuan pembatasan kegiatan dalam upaya pencegahan wabah Covid-19 yang sedang terjadi;



- b. Terbatasnya atau sedikitnya lahan RTH publik yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa sehingga proporsi ideal tidak terpenuhi;
 - c. Minimnya ketersediaan taman kelurahan/desa, taman RW dan taman RT di wilayah kabupaten Pasuruan;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya/potensi lahan-lahan yang sebenarnya dapat ditetapkan atau difungsikan untuk pengembangan pengelolaan RTH;
 - e. Kurangnya pemahaman para stake holder terhadap tanggung jawab dan peran masing-masing dalam pengelolaan RTH.
4. Urusan Kebencanaan Daerah
- a. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan refocussing anggaran
 - b. Perekrutan Unsur Pengarah tidak terlaksana pada tahun 2019, sehingga tahun 2020 posisi Unsur Pengarah tidak ada, sehingga untuk Honor Unsur Pengarah tidak digunakan
 - c. Keterbatasan Kegiatan sosialisasi BPBD dengan adanya Covid-19 karena tidak bisa mengumpulkan banyak orang untuk kegiatan
 - d. Kejadian bencana terjadi di akhir tahun 2020, sehingga anggaran untuk nasi bungkus pada kegiatan Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Air Bersih dan Sanitasi Darurat tidak terserap

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mencapai target meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan tujuan kinerja Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, antara lain melalui :

1. Urusan Pekerjaan Umum Bina Marga



- a. Mempertahankan kondisi jalan, jembatan dan pendukung jalan yang baik melalui program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
 - b. Menyediakan dan mempertahankan infrastruktur pendukung yang baik secara merata di wilayah Kab. Pasuruan untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera, maslahat dan berdaya saing serta pertumbuhan investasi;
 - c. Prioritas pembangunan/ peningkatan jalan strategis guna memudahkan akses menuju ibukota Kabupaten.
 - d. Peningkatan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara jalan kabupaten dengan jalan exit tol akibat Keberadaan Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol – Pandaan – Malang dan ruas Gempol – Pasuruan - Probolinggo;
 - e. Mengkomunikasikan dengan stake holder terkait dengan adanya kendaraan proyek galian C yang beban muatannya terlalu over lout yang melintas yang mengakibatkan kerusakan jalan.
 - f. Pemeliharaan infrastruktur jalan guna mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan agropolitan / minopolitan serta kawasan industri
2. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan sarpras penyediaan air minum dan sarpras pengolahan air limbah
 - b. Menyediakan permukiman layak huni dan sarana prasarana permukiman bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah
 - c. Melakukan penataan kawasan strategis dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
 3. Urusan Lingkungan Hidup



- a. Melakukan pendampingan dan pembinaan pembentukan Bank Sampah baik secara tatap muka;
- b. Melakukan sosialisasi kepada desa/ kelurahan terkait program pengurangan sampah dari sumbernya;
- c. Mendorong sosialisasi desa/ kelurahan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Bank Sampah melalui Dana Desa;
- d. Lebih memaksimalkan kinerja TFL sebagai pendamping desa/ kelurahan.
- e. Memanfaatkan lahan kas desa yang tidak produktif
- f. Pemanfaatan lahan kas desa sebagai bagian dari penyediaan RTH Publik dengan tetap mempertimbangkan faktor lokasi serta luasan lahan minimal RTH yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- g. Meningkatkan fungsi ekologis pada koridor jalur hijau. Setiap jalur jalan yang ditetapkan harus menyediakan RTH Publik berupa sempadan jalan yang memiliki tujuan/fungsi tertentu (estetika maupun ekologis) dengan menanami pohon selaras dengan pengembangan prasarana jalan seperti pedestrian, jalur hijau jalan tol, bahu jalan maupun prasarana pendukung lainnya;
- h. Menetapkan sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan mata air, dan jaringan irigasi sebagai salah satu bagian dari penyediaan RTH Kawasan Perkotaan dengan tetap mempertimbangkan ketetapan luasan RTH sesuai Peraturan Menteri PU nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai serta ketentuan dalam RTRW Kab. Pasuruan;



- i. Mengakuisisi RTH Privat menjadikan bagian RTH perkotaan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Pasuruan. Akuisisi RTH Privat menjadi RTH Perkotaan melalui langkah-langkah yaitu penerapan koefisien dasar hijau (KDH) pada lahan-lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta melalui pengurusan izin mendirikan bangunan, pendataan dan menetapkan RTH Privat sekolah, perkantoran hingga pengembang seperti kawasan perumahan, perbelanjaan, hotel, dan apartemen sebagai bagian dari RTH Perkotaan, untuk para pengembang diminta untuk memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, dalam pengembangan kawasan dikenakan prasyarat KDH minimal 20% berupa taman di kawasan pengembang, pemberian insentif bagi warga yang mengizinkan lahannya untuk diakuisisi berupa keringanan pajak, pajak air tanah, pembayaran tagihan listrik, ataupun telepon;
- j. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi RTH yang ada di dalam perumahan-perumahan dan melakukan koordinasi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Pasuruan & Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pasuruan dalam pengalihan aset sehingga menjadi RTH publik yang dikelola Pemerintah Kab. Pasuruan;
- k. Menetapkan RTH pada kawasan fungsional tertentu seperti sekitar BTS, jaringan listrik (SUTT), jaringan Saluran Umum Tegangan Menengah (SUTM) dan jaringan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR);
- l. Menetapkan kebijakan RTH bagi industri sebagai salah satu bagian syarat dalam izin membangun dengan penetapan RTH minimum 40% dari luasan lahan industri serta memiliki fungsi ekologis pada kawasan terdampak;



- m. Meningkatkan kualitas RTH melalui refungsionalisasi RTH. RTH eksisting ditingkatkan kualitasnya sehingga fungsi ekologisnya dapat lebih optimal melalui refungsionalisasi lahan milik pemerintah yang berstatus HGU pada RTH eksisting jalur hijau dikembalikan menjadi taman, penanaman rumput pada taman-taman lingkungan ataupun lahan bangunan pemerintah yang diperkeras;
 - n. Menghijaukan bangunan (greenroof/greenwall). Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dan kekurangan lahan sehingga menumbuhkan kreatifitas. Penghijauan bangunan dapat memberikan dampak bagi terciptanya iklim mikro perkotaan dan menyerap gas polutan;
 - o. Menetapkan lahan-lahan hijau dalam rencana RTRW maupun RDTR sebagai salah satu bagian dari pengembangan RTH yang memiliki fungsi ekonomi maupun ekologis. Lahan hijau tersebut dapat berupa zona peruntukan lainnya seperti pertanian lahan kering maupun perkebunan. Terkait lahan hijau terutama lokasi lahan sawah yang tidak prioritas dalam LP2B dan tidak memiliki aliran irigasi dapat dikoordinasikan dengan dinas lain dan masuk dalam rencana penetapan RTH;
 - p. Mengidentifikasi lahan kosong eksisting yang tidak memiliki atas hak ataupun tidak bertuan sebagai lahan yang dapat direncanakan sebagai RTH public
 - q. Membangun lahan hijau baru dan perluasan RTH publik melalui pembelian lahan. Pemerintah sebagai pemegang wewenang dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan atau pembangunan taman kota, hutan kota, taman kota, lapangan bola.
4. Urusan Kebencanaan Daerah
- a. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia



- b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan di akhir tahun dengan mengurangi jumlah peserta dan mematuhi Protokol Kesehatan

3.1.5 Tujuan 5: Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan 5 mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif digunakan indikator kinerja *Indeks Reformasi Birokrasi*, yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26
Pencapaian Kinerja Tujuan 5

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	64		

Sumber data:Kementerian PANRB

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	64	-	-	60,67	62,75	

Sumber data:Kementerian PANRB



Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5 s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	70		

Sumber data:Kementerian PANRB

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi		-	-

Sumber data:Kementerian PANRB

Hasil evaluasi program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 belum dapat disimpulkan karena sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, belum dilakukan rilis Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB.

Tabel 3.30 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Per Masing-Masing Komponen dan Sub Komponen Tahun 2019 dan 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2019	2020
A	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,57	
2	Penataan Peraturan Per-UU	5,00	1,35	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,95	



4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,25	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,12	
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,96	
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,97	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,83	
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	28,01	
B	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	10,18	
2	Nilai Kapasitas Organisasi	6,00	4,32	
3	Nilai Persepsi Korupsi	7,00	5,85	
4	Opini BPK	3,00	3,00	
5	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	10,00	8,40	
Total Komponen Hasil (B)		40,00	31,66	
Indek Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	60,67	

Sumber data:Kementerian PANRB

a. Peningkatan Skor SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja atas penyelenggaraan seluruh program dan sasaran/tujuan baik dengan melakukan reuiu RPJMD juga meningkatkan capaian kinerja masing-masing sasaran/tujuan.

Hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan tingkat akuntabilitas.

Rincian hasil penilaian AKIP tahun 2019 dan 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.31
Hasil penilaian AKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 dan 2020

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,62		
2	Pengukuran Kinerja	25	19,68		
3	Pelaporan Kinerja	15	12,04		
4	Evaluasi Internal	10	7,15		
5	Capaian kinerja	20	12,53		
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,02		
	Tingkat Akuntabilitas		BB		

Sumber Data: Kementerian PANRB

Pencapaian nilai AKIP tahun 2020 belum dapat disimpulkan karena sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pasuruan, belum dilakukan rilis hasil/nilai AKIP oleh Kementerian PANRB.

- b. Peningkatan Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik/nilai SAKIP minimal BB

Capaian kinerja persentase perangkat daerah yang berkinerja sangat baik/nilai SAKIP minimal BB dalam tahun 2020 sebesar 58,92 % atau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) OPD. Realisasi tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 23,21% dari realisasi tahun 2019 sebesar 35,71%.

Daftar perangkat daerah yang dievaluasi SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2019 terinci sesuai tabel berikut:



Tabel 3.32
Hasil Evaluasi SAKIP OPDDi Lingkungan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 dan 2020

No.	OPD	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1.	Sekretariat Daerah	80,54	A	83,70	A
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71,62	BB	81,48	A
3.	Inspektorat	72,34	BB	81,11	A
4.	Dinas Perikanan	73,36	BB	80,95	A
5.	Dinas Kesehatan	78,01	BB	80,78	A
6.	Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	80,67	A	80,79	A
7.	Dinas Peternakan Dan Ketahanan Pangan	71,07	BB	80,51	A
8.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	71,04	BB	80,46	A
9.	Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	73,90	BB	80,27	A
10.	Dinas Pertanian	78,80	BB	80,17	A
11.	Rsud Bangil	75,01	BB	80,15	A
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	70,31	BB	80,13	A
13.	Dinas Pendidikan	74,35	BB	80,05	A
14.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	71,24	BB	80,05	A
15.	Dinas Perhubungan	72,11	BB	80,04	A
16.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	73,86	BB	80,03	A
17.	Badan Keuangan Daerah	71,68	BB	77,39	BB
18.	Sekretariat DPRD	73,31	BB	75,04	BB
19.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang	72,93	BB	74,29	BB



20.	Kecamatan Gondangwetan	68,20	B	72,48	BB
21.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	71,55	BB	72,24	BB
22.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	68,16	B	71,78	BB
23.	Kecamatan Sukorejo	68,14	B	70,94	BB
24.	Kecamatan Winongan	61,24	B	70,85	BB
25.	Kecamatan Nguling	64,83	B	70,73	BB
26.	Dinas Lingkungan Hidup	68,16	B	70,70	BB
27.	Kecamatan Pandaan	60,34	B	70,66	BB
28.	Kecamatan Lumbang	63,57	B	70,63	BB
29.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	69,75	B	70,27	BB
30.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	66,68	B	70,20	BB
31.	Dinas Tenaga Kerja	65,96	B	70,08	BB
32.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	65,43	B	70,08	BB
33.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	67,25	B	70,07	BB
34.	Kecamatan Puspo	65,35	B	69,70	B
35.	Bpbd	64,26	B	69,35	B
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	65,25	B	68,88	B
37.	Kecamatan Bangil	63,36	B	68,88	B
38.	Kecamatan Purwodadi	60,53	B	68,03	B
39.	Dinas Sosial	64,01	B	67,68	B
40.	Kecamatan Tosari	60,53	B	67,57	B
41.	Kecamatan Kraton	63,16	B	67,48	B
42.	Kecamatan Rejoso	63,61	B	67,41	B
43.	Kecamatan Pohjentrek	63,44	B	67,32	B
44.	Kecamatan Tukur	62,10	B	67,06	B
45.	Kecamatan Grati	63,28	B	67,04	B
46.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	64,10	B	66,32	B
47.	Kecamatan Pasrepan	61,77	B	66,13	B
48.	Kecamatan Kejayan	61,77	B	66,03	B
49.	Kecamatan Prigen	60,02	B	64,89	B
50.	Kecamatan Gempol	63,98	B	64,77	B
51.	Kecamatan Lekom	61,33	B	64,52	B



52.	Kecamatan Wonorejo	62,16	B	63,83	B
53.	Kecamatan Purwosari	62,33	B	62,68	B
54.	Kecamatan Beji	62,18	B	62,55	B
55.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	62,67	B	62,43	B
56.	Kecamatan Rembang	60,17	B	60,44	B

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

c. Peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Hasil evaluasi atas LPPD tahun 2019 dan 2020 belum ada penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.33

Perbandingan Skor dan Peringkat

Hasil Evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Skor	Peringkat	Keterangan
1	2016	3,5126	6	Peringkat Nasional
2	2017	3,3978	2	Peringkat Nasional
3	2018	3,4784	3	Peringkat Nasional
4	2019			
5	2020			

Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

d. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diwujudkan dengan indikator indeks Kepuasan Masyarakat diberbagai urusan pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) urusan Kependudukan tahun 2020 mencapai 85,97 dan masuk dalam kategori “Baik”, meningkat dibanding realisasi tahun 2019. Kinerja pelayanan kependudukan diukur antara lain dengan indikator sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Capil sebanyak 1.603.550 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP pada tahun 2020 mencapai 1.106.229 jiwa atau 93,11 % dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.188.088 jiwa.



Tabel 3.34
Perkembangan Jumlah
Penduduk yang Ber - KTP
Tahun 2019 - 2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Jumlah penduduk ber KTP	1.314.885	1.106.229
2	Jumlah penduduk wajib ber KTP	1.447.926	1.188.088
3	Kepemilikan KTP (%)	93,09	93,11

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

- Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 1.603.550 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KK pada tahun



2020 mencapai 560.965 keluarga atau 98,10% dari jumlah keluarga wajib KK (571.851 keluarga). Persentase ini telah mencapai 101%

dari target yang ditetapkan sebesar 97%. Pencapaian ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dengan prosentase kepemilikan KK sebesar 98,05%.

- Kepemilikan akta kelahiran tahun 2020 sebesar 1.154.704 Akta, maka kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk sebesar 720 atau sebesar 72,00% dari target 70,00%.



Capaian ini sama dibandingkan capaian tahun 2019 dan telah melebihi dari target yang ditetapkan.

- Penerbitan akte perkawinan (non muslim) pada tahun 2020 sebesar 4.232 akta dari pengajuan pemohon sebanyak 4.232 berkas. Berdasarkan data tersebut artinya pencapaian kinerja di tahun 2020 mencapai 100%, melebihi target sebesar 82%. Pencapaian di tahun ini sama dengan di tahun 2019.
 - Penerbitan akte kematian sejumlah 3.760 dari permohonan yang masuk sebanyak 3.760 berkas, sehingga prosentase penerbitan akte kematian telah mencapai 100%. Capaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2019 dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 72%.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) urusan Komunikasi dan Informatika
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Penyebaran Informasi pada tahun 2020 terdapat peningkatan angka IKM dari 84,20 di tahun 2019 menjadi 84,67, dan masuk dalam kategori 'Baik'.
Pada tahun 2020 jumlah pengunjung website sejumlah 80.889 pengunjung, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 36.000 pengunjung, sehingga mengalami kenaikan yang sangat besar. Hal ini antara lain karena banyak masyarakat



yang ingin mengakses informasi tentang Kabupaten Pasuruan.



- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pasuruan tahun 2020 mencapai 3,13 sedangkan tahun 2019 mencapai 2,73, mengalami kenaikan pada kategori “baik”.
- Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi pada tahun 2020 sebesar 84,74%. Capaian ini sebesar 102,71% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 82,50%.
- Pada tahun 2020 terdapat 22 OPD yang telah menerapkan E-Government, sedangkan jumlah OPD yang memiliki layanan administrasi pemerintahan secara keseluruhan ada 67 OPD. Sehingga realisasi dari indikator persentase OPD yang menerapkan E-Government di tahun 2020 sebesar 32,84% dari target yang ditetapkan sebesar 45% atau tingkat pencapaiannya 72,97%. OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah terhubung dalam jaringan E-Gov. Pemanfaatan e-Gov dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah secara elektronik (E-TPPD) <http://tpp.pasuruankab.go.id>.



- Website atau aplikasi ini membantu penghitungan dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai di Kabupaten Pasuruan, yang meliputi antara lain aktivitas harian, tingkat kehadiran, nilai SAKIP dan penyerapan anggaran.
 - Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) <http://tnde.pasuruankab.go.id>.
Aplikasi ini bisa memangkas waktu dalam pengiriman berbagai macam dokumen
 - E-Reporting <http://blp.pasuruankab.go.id>.
 - E-reporting ini merupakan rekapitulasi hasil dari pengadaan barang/jasa.
 - Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD) <http://sipkd.pasuruankab.go.id>.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) urusan Perpustakaan dan Kearsipan
- Kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan berdasarkan hasil survey memperoleh nilai 83.33 (kategori baik), mengalami peningkatan 0.58 dari pencapaian tahun 2019 yang memperoleh nilai 82.75.
- Kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan ditunjukkan dengan jumlah pengunjung perpustakaan. Tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan sebanyak 34.018 orang atau sekitar 9,68%. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang terjadi diseluruh dunia termasuk Indonesia. Mengingat Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didalamnya terdapat kebijakan peliburan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan ditempat/fasilitas umum sehingga hal



tersebut mengurangi jumlah perpustakaan umum di Kabupaten pada khususnya.

Nilai audit arsip yang dilakukan tahun 2020 mencapai 79,67. Nilai tersebut meningkat sebesar 17,52 poin dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 62,15 (cukup).

- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) urusan Penanaman Modal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) mencapai 83,05%. Pencapaian tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun 2019 sebesar 1,88% dari 84,93%

Jumlah investasi yang terealisasi pada tahun 2020 sebesar 10 T dan mengalami penurunan sebesar 8,91 T dari tahun 2019.

- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD

Indeks kepuasan layanan masyarakat atas pelayanan Sekretariat DPRD tahun tahun 2020 dengan skor 92,19. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 88,75 terdapat peningkatan sebesar 3,44 poin, namun kedua nilai tersebut relatif tergolong dalam predikat "Sangat Baik".

Sedangkan layanan berupa fasilitasi terhadap keluhan masyarakat ke DPRD telah mencapai 100%. Jumlah keluhan yang tercatat di tahun 2019 sebanyak 116 kali dan tahun 2020 menurun menjadi 102 kali. penurunan ini dikarenakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan sering turun langsung ke masyarakat untuk menjaring aspirasi dari masyarakat

Pada tahun 2020 dari total 56 (lima puluh enam) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, semuanya ber IKM minimal baik sehingga persentasenya mencapai 100%. Kondisi ini lebih tinggi/ada peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 94,64%.



e. Peningkatan Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Secara teknis, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Adapun Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.35
Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN
Tahun 2020

Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
9359	12.26	27.95	25	4.99	70.2

1) Persentase Pegawai yang Lulus Diklat

Pada tahun 2020 capaian kinerja indikator Prosentase Pegawai Yang Lulus Diklat adalah sebesar 62,72% atau sebanyak 5.870 orang dari jumlah seluruh pegawai sebanyak 9.359 orang, sedangkan pada tahun 2019 indikator ini mencapai 61,50%, hal ini mengalami kenaikan sebesar 1,22%



dari tahun 2019. Capaian ini telah memenuhi target pada tahun 2020 sebesar 62%.

Upaya dalam meningkatkan persentase pegawai yang lulus diklat di saat pandemi seperti ini diantaranya yaitu menyelenggarakan diklat Latihan Prajabatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dengan sistem online/daring, selain itu juga mengikutkan pegawai dalam diklat yang diselenggarakan diluar Pemerintah Kabupaten Pasuruan seperti diklat yang diselenggarakan Pemerintah Pusat maupun Perguruan Tinggi.

2) Persentase Pelanggaran Disiplin

Capaian kinerja Pelanggaran Disiplin pada tahun 2020 sebesar 0,16% atau jumlah kasus pelanggaran disiplin sebanyak 15 orang dari seluruh jumlah pegawai sebanyak 9.359 orang. Realisasi ini turun 0,02% dari tahun 2019 sebesar 0,18% atau sejumlah 18 kasus pelanggaran.

Dalam hal menegakkan disiplin aparatur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan berbagai upaya melalui kegiatan antara lain:

- Dalam kondisi pandemi tetap melaksanakan pembinaan dengan cara memberikan tugas dengan mengedepankan protokol kesehatan;
- BKPPD merupakan bagian dari tim gugus Covid-19 melakukan monev pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian tanpa melupakan protokol kesehatan;
- Melaksanakan penanganan masalah kepegawaian dengan melakukan sidak, kunjungan lapangan dan siding penanganan pelanggaran disiplin untuk menentukan penjatuhan hukuman disiplin.

3) Persentase Peningkatan Kinerja ASN dalam Penilaian SKP

Capaian indikator kinerja Prosentase Peningkatan Kinerja ASN dalam Penilaian SKP pada tahun 2020 sebesar 99% atau



jumlah Pegawai dengan nilai SKP baik sebanyak 9.336 orang. Capaian ini telah sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini karena upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membina Aparatur karena penilaian kinerja merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi.

4) Persentase ASN yang memiliki Kualifikasi Ijazah S1/S2/S3

Pada tahun 2020 capaian persentase jumlah pegawai yang memiliki ijazah setara S1/S2/S3 sebesar 67,74 atau naik sebesar 2,85% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 64,89%. Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi ijazah S1/S2/S3 sebanyak 6.510 orang. Keberhasilan ini selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah melalui program kegiatan tugas belajar yang dibiayai penuh oleh Pemerintah Pusat juga diberikan ijin belajar kepada pegawai yang biayanya ditanggung sendiri oleh pegawai tersebut, tetapi sebagai wujud komitmen peningkatan kualifikasi pendidikan pegawainya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pegawai yang melanjutkan pendidikannya tersebut.

5) Persentase ASN yang lulus ujian Tingkat 1,2 dan Penyesuaian Ijazah

Pada tahun 2020 capaian persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2 dan penyesuaian ijazah sebesar 77,08% atau sebanyak 5.375 orang. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 4,22% dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 72,86%. Indikator ini merupakan perbandingan antara ASN yang lulus ujian dinas dan diakui secara kepegawaian dibandingkan jumlah seluruh ASN.

f. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti



Pada tahun 2020 Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan menyangkut 2 hal yaitu Indeks Williamson dan Indeks Kesalehan Sosial. Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Sedangkan Indeks Kesalehan Sosial digunakan untuk mengukur tingkat kebaikan (salih) atau manfaat seseorang dalam kerangka hidup bermasyarakat. Indeks Williamson dan Indeks Kesalehan Sosial merupakan indikator makro daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan. Kedua indikator tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi atas tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan sebagai bahan perencanaan di tahun berikutnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti di tahun 2020 adalah 100%.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif, antara lain:

1. Urusan Kependudukan

- a. Sarana dan prasarana alat perekaman di 24 kecamatan butuh peremajaan karena alat perekaman kondisinya sering mengalami masalah
- b. Masih kurangnya Mobil Pelayanan Keliling untuk melayani program Jemput Bola kepada Masyarakat
- c. Masih banyak daerah di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sulit tersentuh jaringan internet sehingga menyulitkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat



- d. Kurangnya sarana prasarana arsip data kependudukan (Rak arsip, lemari arsip, scanner peta) Depo yang kurang memadai dan representatif
2. Urusan Komunikasi
 - a. Diperlukannya peningkatan Keamanan Informasi
 - b. Belum dilakukannya Implementasi E-Government
 - c. Perlu adanya penguatan Infrastruktur IT
 - d. Adanya tuntutan Publik pada keterbukaan Informasi dan Transparansi Komunikasi Publik
 - e. Diperlukannya pengelolaan Data dan Statistik berbasis IT
3. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
 - a. Kurangnya perpustakaan yang memenuhi standart Minimal dan berakreditasi A
 - b. Belum adanya Gedung Perpustakaan di setiap Kecamatan dan Desa (24 Kecamatan) hanya ada 8 Perpustakaan Umum
4. Urusan Penanaman Modal
 - a. Sistem pelayanan tatap muka ditiadakan dikarenakan pandemi covid-19
 - b. Kurang nyasosialisasiregulasi-regulasi baru terkait pelayanan perizinan dan non perizinan
 - c. Penyelesaian proses penerbitan izin membutuhkan waktu yang lama, karena perangkat daerah yang memberikan rekomendasi teknis untuk dasar penerbitan izin belum berada di 1 (satu) atap dan perangkat daerah belum maksimal dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - d. Belum terintegrasinya secara online dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis
5. Urusan Penunjang
 - a. Masyarakat belum menganggap Inovasi daerah sebagai budaya



- b. Pelaksanaan survey penelitian di tengah pandemi Covid - 19 agak mengalami kesulitan dikarenakan pembatasan pergerakan orang dan timbulan kerumunan untuk mencegah penyebarannya.
- c. Belum adanya jabatan fungsional peneliti
- d. Pandemi covid-19 mengakibatkan anggaran refocusing mulai dari 20% hingga 50%
- e. Dari total 37 kegiatan BKPPD terdapat 9 kegiatan yang ditunda karena selain anggarannya direfocusing juga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan akibat adanya pandemi
- f. Realisasi anggaran kegiatan di BKD 'Pengamanan dan Penghapusan Aset Daerah' rendah, dikarenakan berkurangnya aktifitas kegiatan penyertifikatan tanah daerah baik di BPN dan BKD Bidang Aset yang terdampak pandemi Covid-19
- g. Kegiatan BKD 'Pengembangan Sumber Daya Aparatur' tidak terealisasi karena pembatasan kegiatan sebagai upaya pengendalian pandemi Covid-19

Adapun upaya untuk Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kependudukan
 - a. Melakukan pengajuan usulan Program dan kegiatan pengadaan alat perekaman di 24 kecamatan
 - b. Mengadakan kegiatan pelayanan kios E PAK LADI di desa dan kelurahan di 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Pengadaan Mobil Keliling untuk pelayanan Jemput Bola



- kepada Masyarakat Daerah terpenci/blank hotspot dan penduduk rentan di Dinas Sosial/Pantai Asuhan.
- c. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelancaran jaringan internet dalam memberikan pelayanan yang kepada masyarakat
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana penyimpanan arsip data kependudukan dan pemeliharaan agar memiliki tempat penyimpanan arsip yang sesuai standart dan terjaga dengan baik
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
- a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan pemerintah, promosi, potensi daerah maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
 - b. Merekrut tenaga Ahli dalam bidang Teknologi Informatika;
 - c. Mengoptimalkan adanya telecenter di daerah daerah tersebut (blank spot).
3. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
- a. Melakukan pembinaan, pelatihan dan monitoring secara Intensif dan berkelanjutan;
 - b. Mengajukan usulan Program Pembangunan Gedung Perpustakaan tiap Kecamatan/ Desa;
 - c. Melakukan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kearsipan pada OPD, UPT, Desa dan Kelurahan se Kabupaten Pasuruan secara intensif agar penataan arsip di perangkat daerah tertib dan sesuai dengan pertauran yang berlaku;
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana penyimpanan arsip dan pemeliharaan arsip agar memiliki tempat penyimpanan arsip yang sesuai standart dan arsip terjaga dengan baik.
4. Urusan Penanaman Modal
- a. Sistem pelayanan perizinan beralih dengan mengoptimalkan penggunaansistem online



- b. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang regulasi-regulasi baru terkait pelayanan perizinan dan non perizinan
 - c. Dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan memaksimalkan pelaksanaan SOP yang telah dibuat
 - d. Dibuatnya aplikasi terintegrasi secara elektronik dengan Perangkat Daerah teknis sebagai *tracking system*
5. Urusan Penunjang
- a. Mendorong setiap perangkat daerah melakukan inovasi dalam penyelenggaraan urusan di semua bidang sesuai kewenangan masing-masing.
 - b. Mendorong munculnya inovasi masyarakat dengan memberikan reward/penghargaan yang pantas kepada inovator terbaik se-Kabupaten Pasuruan.
 - c. Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
 - d. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Penta Helix (Akademisi, Swasta, Komunitas, pemerintah, dan Media) untuk mengembangkan berbagai inovasi yang aplikatif.
 - e. Melaksanakan survey dengan protokol kesehatan penuh meliputi memakai masker, menjaga jarak aman untuk interaksi, membatasi jumlah orang dalam satu area, membasuh tangan dengan hand sanitizer, sering-sering cuci tangan serta menghindari penularan melalui media survey (kertas dan pena) dengan tidak menggunakan secara bergantian.
 - f. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi yang berminat untuk menjadi fungsional peneliti, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai peta jabatan yang tersedia.
 - g. Anggaran kegiatan yang difocusing diambil pada kegiatan yang bisa ditunda sedangkan yang prioritas masih tetap dianggarkan



- h. Kegiatan BKPPD yang ditunda sebanyak 9 kegiatan di anggarankan kembali untuk dilaksanakan pada tahun 2021 sedangkan kegiatan prioritas yang harus tetap berjalan walaupun dalam kondisi pandemi dilakukan dengan sistem daring/online
- i. Melakukan upaya koordinasi terkait dengan penyertifikatan tanah dengan pihak-pihak terkait misalnya BPN, BKD bidang asset dan lainnya
- j. Mengikuti berbagai seminar yang dilaksanakan secara daring (webinar)

6. Tujuan 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas digunakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.36

Pencapaian Kinerja Tujuan 6

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	68,90	68,6	99,56

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.37

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	68,90	65,71	66,69	67,41	68,29	68,6

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan



Tabel 3.38

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6 s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	70,98	68,6	96,65

Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.39

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	68,60	71,94	-3,34

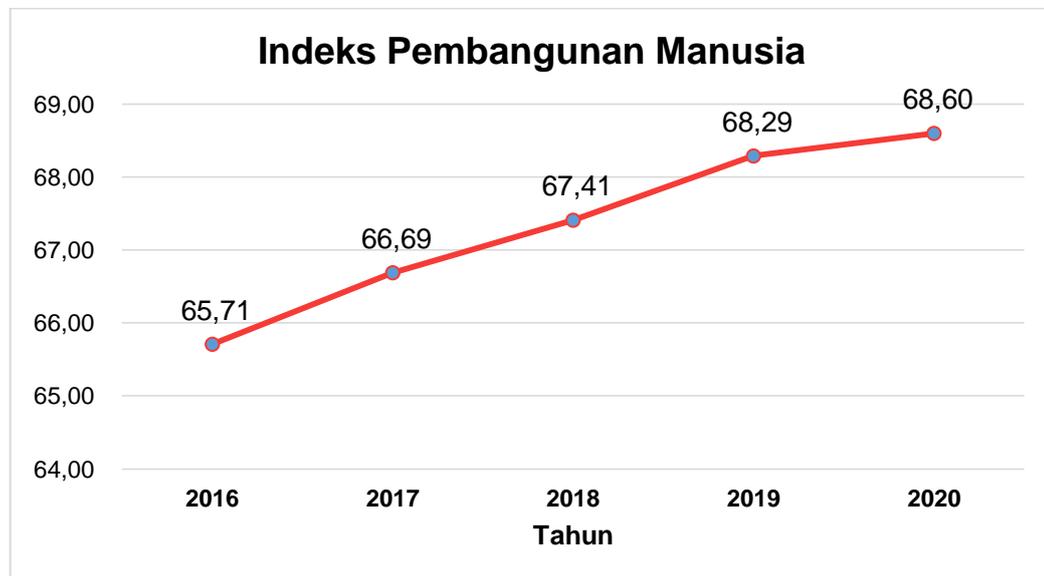
Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Dari tabel 3.36 sampai dengan 3.39 tersebut di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Tujuan 6 dalam tahun 2020 dikatakan **berhasil** dengan nilai capaian 99,56%. Dimana Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 68,90 dan terealisasi sebesar 68,60. Begitu juga bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 70,98 tingkat kemajuannya telah mencapai sebesar 96,65%.

Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang meningkat, yaitu, pada tahun 2016 sebesar 65,71, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 66,69 dan tahun 2018 meningkat menjadi 67,41, tahun 2019 menjadi 68,29 dan di tahun 2020 mencapai 68,60. Peningkatan IPM tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perkembangan angka IPM Kabupaten Pasuruan dari tahun 2016 – 2020 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.8
Perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan
Tahun 2016 – 2020



Sumber data: BPS Kabupaten Pasuruan

Hal utama yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Indeks Pembangunan Manusia dalam rangka mewujudkan Tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain:

1. Urusan Kesehatan

- a. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup mencapai 70,23 dan telah memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2020 senilai 69,91 atau tingkat pencapaiannya 100,46%.

- b. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pasuruan tahun 2020 tercapai sebesar 4,40 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini mengalami penurunan 0,04 jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,33 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari target RPJMD untuk tahun 2020 sebesar 6,5 per 1.000 kelahiran hidup maka pencapaian tahun 2020 sudah melampaui dari target



yang telah ditetapkan. Jumlah kematian bayi tahun 2020 sebanyak 105 kasus, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 134 kasus.

Penyebab kematian terbesar adalah karena : Asfiksia sebanyak 44 kasus (42%) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 31 kasus (29%), kelainan kongenital bawaan sejumlah 14 kasus (13%), Sepsis sebanyak 5 kasus (5%), lain lain sebanyak 10 kasus (10%).

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan diantaranya:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- 2) Peningkatan pemeriksaan ibu hamil di Posyandu dengan revitalisasi posyandu (ibu hamil sadar Posyandu);
- 3) Penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga medis meliputi Pelatihan Gawat darurat Maternal Neonatal, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

- c. Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar 76,3 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tahun 2020 menurun dibandingkan capaian tahun 2019 yakni sebesar 83,61 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 19 kasus sedangkan tahun 2019 sebanyak 21 kasus.

Upaya yang telah dilakukan dan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penurunan angka kematian ibu adalah:

- 1) Membuat SIP (Sistem Informasi Posyandu)
- 2) Meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care/ANC) pada ibu hamil secara kontinyu.



- 3) Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang berisiko tinggi dapat dilakukan sejak awal.
 - 4) Meningkatkan pola/sistem rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien.
- d. Jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,029% atau sebanyak 34 balita dari 117.832 balita di Kabupaten Pasuruan. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 40 balita atau sebesar 0,001%.
- Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi balita gizi buruk adalah:
- 1) Melakukan sejumlah intervensi spesifik dan sensitive, diantaranya dengan sosialisasi kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil terkait pemenuhan gizi;
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan – Pemulihan (PMT-P) kepada balita dan bumil KEK (ibu hamil Kekurangan Energi Kronis).
 - 3) Melakukan kegiatan Evaluasi program gizi di Puskesmas secara rutin.
 - 4) Meningkatkan kegiatan *Surveylans* Gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sehingga penemuan penanganan kasus sedini mungkin.
 - 5) Mengoptimalkan dukungan dari pihak terkait diantaranya CSR untuk kegiatan penanganan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan.
- e. Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS) dicapai dengan melakukan Survey Mawas diri pada Keluarga di Kabupaten Pasuruan setiap tahun. Hasil Survey Tahun 2020 sebesar 84.864 KK (51,50%) sedangkan Tahun 2019 sebesar 94.026 KK (51,20%) capaiannya meningkat dan sudah memenuhi target.



Namun demikian tetap perlu ditingkatkan agar masyarakat sadar akan pentingnya ber-PHBS dalam pencegahan penyakit.

Beberapa Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah:

1) Menggalakkan Program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat) yaitu:

- Memakai masker;
- Mencuci tangan pakai sabun;
- Menjaga jarak;
- Mengonsumsi suplemen/ vitamin agar imun tubuh kuat.

2) Menggalakkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

- f. Di Kabupaten Pasuruan jumlah desa siaga aktif pada tahun 2020 tercapai 100 % (365 desa/kel), capaian ini juga sama pada tahun 2019 yaitu 100 %. Hal ini menunjukkan tercapainya program desa siaga aktif di Kabupaten Pasuruan. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga aktif terbagi kedalam 4 kategori, pada tahun 2020 terdapat 77 strata Aktif Pratama, 230 Aktif Madya, 53 Aktif Purnama, dan 5 Aktif Mandiri.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan persentase desa siaga yaitu dengan meningkatkan pelayanan pada tingkat Desa, tidak hanya pelayanan kesehatan tetapi berbagai bentuk pelayanan yang dapat merubah perilaku masyarakat untuk ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pengembangan desa / kelurahan siaga aktif di wilayah Kabupaten Pasuruan sudah aktif semua (100%) namun mayoritas masih berada pada strata Aktif Madya. Sedangkan untuk desa / kelurahan siaga aktif Puri (Purnama dan Mandiri) di Kabupaten



Pasuruan masih rendah. Hal ini terkendala sulitnya mencapai kriteria banyaknya (prosentase) pembinaan PHBS rumah tangga di desa / kelurahan, di masa pandemi Covid-19 sulit untuk mengadakan pembinaan dengan mengumpulkan sasaran dalam jumlah banyak.

- g. Rata-rata Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) di Puskesmas se Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 82,75, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 82,73 dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar 0,02. Capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,1.

Salah satu Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan melaksanakan promosi dan edukasi terkait dengan perilaku hidup sehat dan gizi, serta meningkatkan kualitas penanganan terkait masalah tersebut.

- h. Akreditasi Puskesmas pada wilayah Kabupaten Pasuruan dimulai tahun 2016 berawal dari 4 Puskesmas (12%) dari 33 Puskesmas. Pada tahun 2020 seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan sebanyak 33 sudah terakreditasi dengan rincian 2 Puskesmas strata Dasar, 18 Puskesmas strata Madya, 12 Puskesmas strata Utama dan 2 Puskesmas strata Paripurna serta RSUD Grati terakreditasi madya.

Upaya Dinas kesehatan dalam meningkatkan presentase puskesmas dan RSUD yang terakreditasi strata madya yaitu dengan melaksanakan penilaian akreditasi pada seluruh layanan Fasilitas pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan (FKTL) yang ada

- i. Indikator ini diukur berdasarkan dari Elemen Penilaian (EP) Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh penjuru termasuk di Kabupaten Pasuruan maka sesuai dengan



Surat Edaran Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 408/SE/KARS/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Penundaan Kegiatan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Terkait Akreditasi dan surat edaran nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020 ditujukan kepada para kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Pusdokes Polri, Kepala Puskes TNI, Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dan kepala, direktur utama, direktur rumah sakit di seluruh Indonesia. Maka RSUD Bangil tidak dilakukan survey akreditasi. Namun demikian pelayanan Covid -19 di RSUD Bangil tetap dilayani sesuai dengan standar akreditasi dan RSUD Bangil tetap melakukan self assesment pada elemen penilaian akreditasi dengan hasil 87,56.

- j. Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien atau keluarga pasien. Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Baku yang ditetapkan oleh Kemenpan RB Nomor: 14 Tahun 2017 tentang: Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana pada Tahun 2020 capaian IKM RSUD Bangil sebesar 85,19 %, pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 82,32 % (melebihi target 2,87 %).

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Pada tahun 2020 pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sejumlah 269.473 akseptor atau 74,91 % dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 359,716 orang. Capaian tahun 2020 ini sedikit turun dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2020 sebesar 75,20%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 75,14%, maka capaian persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif mengalami



penurunan sebesar 0,23% atau sebanyak 4.030 akseptor disebabkan karena pengaruh pandemicovid-19.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif bagi pasangan usia subur (PUS) yakni meliputi kegiatan pelayanan KB gratis melalui kegiatan Baksos, KIE Berbagai Media dan MUPEN, Kesatuan Gerak PKK, TNI manunggal KB. Kedepannya Pemerintah daerah akan lebih berkomitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk lebih meningkatkan peserta KB aktif pada PUS.

- b. Pada indikator Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatan ekonominya rendah, sehingga target grup penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan *social psikologis (social psychological needs)*.

Jumlah keluarga Miskin (Keluarga Pra-S dan KS-I) pada tahun 2020 cenderung sama dengan pada tahun 2019 yaitu 197.750 KK atau 39,72% dari jumlah KK di Kabupaten Pasuruan yaitu sebanyak 497.807KK. Hal ini karena di tahun 2020 tidak terdapat *updating data*, dan untuk selanjutnya mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 akan diganti dengan indicator sasaran Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).



3. Urusan Pendidikan

a. Peningkatan rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 mencapai 8,02 tahun sama dengan realisasi tahun 2019 dan belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar 8,06 tahun.

Tidak adanya peningkatan realisasi di tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 yang berdampak langsung ke perekonomian masyarakat sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah pendaftar sekolah, dan juga adanya kebijakan refofusing tahun 2020 mengakibatkan Gerakan Kembali Belajar yang dicanangkan Dinas Pendidikan sebagai upaya meningkatkan Rata Lama Sekolah belum bisa dilaksanakan.

b. Peningkatan angka harapan lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Menurut data BPS Kabupaten Pasuruan menunjukkan HLS tahun 2020 mencapai 12,41 tahun, yang artinya penduduk yang usia sekolah mempunyai harapan dapat menempuh pendidikan hingga D1. Dibandingkan tahun 2019, HLS tahun 2020 mengalami peningkatan 0,10 poin dengan tingkat capaian 100,81%.

4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Penurunan Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau



perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jumlah kekerasan (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Persentase kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2020 sebesar 0,0063% atau terdapat 48 kasus kekerasan dari total jumlah perempuan dan anak 761.653 jiwa. Persentase ini mengalami penurunan sebesar 0,004% dibandingkan dengan tahun 2019 dan telah memenuhi target sebesar 94,97% dari target tahun 2020 yaitu 0,0060%. Hal ini salah satunya didukung dengan program inovasi SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Dengan semakin banyak kasus yang terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

Tabel 3.40
Perkembangan Jumlah Kekerasan (KDRT)
Tahun 2019 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2019	2020
Jumlah kekerasan (KDRT)	55 Kasus	48 kasus
Jumlah Perempuan & Anak	820.893 jiwa	761.653 jiwa
Persentase Kekerasan perempuan dan anak	0,0067 %	0,0063%

Sumber data: Dinas KBPP Kab. Pasuruan

b. Anggaran yang Responsif Gender

Jumlah anggaran yang responsif gender pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.516.839.718.422 atau 18,31% dari jumlah anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah berkomitmen dalam mendukung percepatan pengarusutamaan gender.



5. Urusan Pemuda dan Olah Raga

a. Jumlah Pemuda Berprestasi

Pada tahun 2020 jumlah pemuda berprestasi sebanyak 5 orang dan tidak memenuhi target yang ditentukan di tahun 2020 (13 orang). Menurunnya capaian ini diakibatkan adanya pandemi covid-19 sehingga berkurangnya *event* / perlombaan yang dilaksanakan baik ditingkat Propinsi maupun Nasional bahkan Tingkat Regional.

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk dapat menghasilkan bibit pemuda dan atlet prestasi antara lain dengan melaksanakan kegiatan :

- 1) Pembinaan organisasi kepemudaan.
- 2) Seleksi siswa pasukan Paskibraka.
- 3) Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda.
- 4) Pemuda pelopor.

b. Jumlah Atlet yang berprestasi

Pada tahun 2020 di Kabupaten Pasuruan tidak ada atlet yang berprestasi, menurun jauh apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 42 orang atlet, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada event olahraga sama sekali sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain:

1. Urusan Kesehatan

- a. Masih ditemukan aktivitas Buang Air Besar Sembarangan (BAB's)/ ODF di Kabupaten Pasuruan
- b. Masih ditemukannya stunting



- c. Masih adanya angka kematian Ibu bersalin (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB)
 - d. Ditemukannya angka prevalensi kusta
 - e. Pandemi covid-19
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Angka kesertaan KB MKJP masih rendah khususnya IUD dan MOP
 - b. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan
 - c. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka sinkronisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan
 - d. Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)
3. Urusan Pendidikan
- a. Diperlukannya menciptakan generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi
 - b. Masih kurangnya kemampuan peserta didik membaca. menulis. menghafal. memahami. dan mengamalkan makna pokok kandungan Al-Qur'an
 - c. Kurangnya akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi luar negeri bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi
 - d. Kurang meratanya mutu pendidikan PAUD dan Dikmas baik bagi peserta didik maupun guru. serta sarana dan prasarana



- e. Kurangnya fleksibilitas pelayanan Dapodik di tingkat kecamatan dan wilayah. sehingga harus datang langsung ke Dinas Pendidikan
 - f. Kurangnya kualitas pendidik lembaga pendidikan SD dan SMP. negeri dan swasta
 - g. Kondisi bangunan lembaga pendidikan PAUD berupa pavingisasi yang kurang memadai
 - h. Kurang memadainya kualitas sarana dan prasarana lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
 - i. Kurang memadainya kualitas sarana dan prasarna serta kegiatan ekstrakurikuler lembaga PAUD
4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Kurangnya komitmen pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat dan dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak
 - b. Kurangnya peran dan eksistensi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan.
 - c. Kurangnya acuan bagi aparatur OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
 - d. Diperlukan tindaklanjut atas Perbup No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Maka SE Bupati Pasuruan No. 360/1836/424.080/2020 merupakan instruksi Bupati



Pasuruan kepada seluruh OPD, Setda serta Kecamatan membuat dokumen PPRG dan Desa membuat rencana kegiatan yang responsif gender.

5. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - a. Perlu adanya pemenuhan Sarana Olahraga dan Gedung Pemuda untuk menampung aktifitas
 - b. Pemberian *reward* atlet yang berprestasi agar tidak pindah ke daerah lain

Adapun upaya untuk Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas pada Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Urusan Kesehatan
 - a. Melakukan program Ayo Nggawe WC “AGAWÉ”
 - b. Melakukan upaya penurunan STUNTING di Kabupaten Pasuruan
 - c. Melakukan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) & angka kematian bayi (AKB)
 - d. Melakukan berbagai upaya penanganan Covid-19
2. Urusan Pendidikan
 - a. Melaksanakan pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal non formal dan informal
 - b. Melakukan Pengembangan pendidikan karakter bagi anak
 - c. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - d. Melakukan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
 - e. Peningkatan pengelolaan Data Pokok Pendidikan
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Melakukan pengembangan Kabupaten Layak Anak
 - b. Melakukan pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- c. Menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
 - d. Melakukan pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Kabupaten Pasuruan
4. Urusan Pemuda dan Olah Raga
- a. Pengalihan aset lapangan sepakbola dari Kelurahan ke Dispora
 - b. Pengalihan Pengelolaan Kepramukaan
 - c. Penyediaan sarana olahraga (ruang fitnes)

A. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 (*unaudited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41
Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran	Realisasi	
1	PENDAPATAN	3.241.449.215.186,01	3.217.041.299.117,40	(24.407.916.068,61)
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	658.747.582.583,01	700.111.491.641,40	41.363.909.058,39
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	397.346.266.028,09	360.849.440.481,02	(36.496.825.547,07)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	30.048.065.217,92	34.236.693.406,00	4.188.628.188,08
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.760.005,00	4.724.719.096,00	69.959.091,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	226.698.491.332,00	300.300.638.658,38	73.602.147.326,38
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.793.065.079.336,00	1.755.653.880.426,00	(37.411.198.910,00)
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	289.249.810.251,00	271.830.390.452,00	(17.419.419.799,00)



No	Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran	Realisasi	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.120.144.764.000,00	1.103.294.454.000,00	(16.850.310.000,00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	383.670.505.085,00	380.529.035.974,00	(3.141.469.111,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	789.636.553.267,00	761.275.927.050,00	(28.360.626.217,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	167.983.542.517,00	164.679.420.467,00	(3.304.122.050,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	196.300.000.000,00	171.461.978.633,00	(24.838.021.367,00)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	381.830.182.000,00	381.611.699.200,00	(218.482.800,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.522.828.750,00	43.522.828.750,00	0,00
2	BELANJA	3.540.643.197.884,28	3.238.383.232.383,24	(302.259.965.501,04)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.071.180.797.846,57	1.974.235.435.742,00	(96.945.362.104,57)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.046.738.603.167,65	997.301.803.350,00	(49.436.799.817,65)
2.1.4	Belanja Hibah	139.417.875.283,90	126.307.448.453,00	(13.110.426.830,90)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	39.022.375.000,00	34.784.875.000,00	(4.237.500.000,00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa	43.406.157.391,02	43.341.894.789,00	(64.262.602,02)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	611.101.017.004,00	600.400.751.456,00	(10.700.265.548,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	191.494.770.000,00	172.098.662.694,00	(19.396.107.306,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.469.462.400.037,71	1.264.147.796.641,24	(205.314.603.396,47)
2.2.1	Belanja Pegawai	218.975.553.331,37	205.840.410.542,00	(13.135.142.789,37)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	836.643.174.003,81	706.180.335.963,96	(130.462.838.039,85)
2.2.3	Belanja Modal	413.843.672.702,53	352.127.050.135,28	(61.716.622.567,25)



No	Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran	Realisasi	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(299.193.982.698,27)	(21.341.933.265,84)	277.852.049.432,43
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	302.450.746.781,27	302.450.746.781,27	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	302.450.746.781,27	302.450.746.781,27	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.256.764.083,00	0,00	(3.256.764.083,00)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	302.450.746.781,27	302.450.746.781,27	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.256.764.083,00	0,00	(3.256.764.083,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.256.764.083,00	0,00	(3.256.764.083,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	299.193.982.698,27	302.450.746.781,27	3.256.764.083,00

2. Alokasi Anggaran Per Tujuan Pembangunan

Jumlah anggaran pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.469.462.400.037,71 telah dialokasikan pada masing-masing Tujuan sebagai berikut:



Tabel 3.42
Alokasi Anggaran Per Tujuan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Tahun Anggaran 2020

Tujuan				Anggaran	
Uraian		Indikator Kinerja		Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	52.152.804.434,16	3,55
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2.1	Angka Kemiskinan	8.900.810.869,50	0,61
3	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	3.1	Indeks Kesalehan Sosial	4.077.574.407,00	0,28
4	Mewujudkan pembangunan yang berkadilan	4.1	Indeks <i>Williamson</i>	440.372.871.399,00	29,97
5	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	352.875.819.864,11	24,01
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	6.1	Indeks Pembangunan Manusia	611.082.519.063,94	41,59
JUMLAH				1.469.462.400.037,71	100,00

Dari tabel tersebut mencerminkan alokasi anggaran terbesar terdapat pada 3 indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia sebesar 41,59% diikuti Indeks *Williamson* sebesar 29,97% dan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 24,01%.



3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja terhadap enam Tujuan dianggarkan sebesar Rp.1.469.462.400.037,71 dan terealisasi sebesar Rp.1.264.147.796.641,24, atau 86,03% dari jumlah anggaran.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.43
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020

Tujuan				Anggaran			Tingkat
Uraian	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	-35,43	52.152.804.434,16	43.027.308.856,00	82,50	-117,93
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	100,96	8.900.810.869,50	7.616.170.479,00	85,57	15,40
3	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	122,76	4.077.574.407,00	2.813.533.663,00	69,00	53,76
4	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Wiliamson	91,37	440.372.871.399,00	365.233.885.678,00	82,94	8,44
5	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan,	Indeks Reformasi Birokrasi		352.875.819.864,11	295.690.254.618,00	83,79	



Tujuan			Anggaran			Tingkat
Uraian	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
akuntabel dan responsif						
6 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	99,56	611.082.519.063,94	549.766.643.347,24	89,97	9,60
JUMLAH			1.469.462.400.037,71	1.264.147.796.641,24	86,03	21,80
RATA-RATA TINGKAT EFISIENSI						21,80

Berdasarkan tabel 3.43 terkait efisiensi penggunaan sumber daya yang terdiri dari 6 komponen penyusun dapat disimpulkan bahwa hanya 4 komponen yang dapat ditarik kesimpulan terkait efisiensi. Keempat komponen tersebut yakni Angka Kemiskinan, Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Wiliamson, dan Indeks Pembangunan Manusia dengan nilairata-rata efisiensi 21,80%. Artinya anggaran mampu diefisiensikan sebesar 21,80% dari besar capaian kinerjanya. Dua komponen yang dikecualikan dari perhitungan rata-rata efisiensi yakni Angka Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Reformasi Birokrasi dikarenakan:

1. Angka Pertumbuhan Ekonomi pada kondisi ekstrem dimana nilai capaian kinerja bernilai negatif sehingga akan menghasilkan nilai efisiensi negatif pula. Pada akhirnya, jika diambil rata-rata tingkat efisiensi keseluruhan akan memengaruhi nilai efisiensi lainnya secara signifikan. Realiasi angka pertumbuhan ekonomi bernilai negatif karena adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan melambatnya berbagai sektor termasuk sektor ekonomi.
2. Permen PANRB belum merilis hasil Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Pemda.



3.2 Prestasi dan Penghargaan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan telah membuahkan keberhasilan dengan menorehkan prestasi pada beberapa bidang pembangunan. Daftar prestasi dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020 dapat dilihat di Lampiran 8.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hasil analisis pencapaian keberhasilan terhadap pencapaian 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) indikator tujuan dari 6 (enam) tujuan dengan 6 (enam) indikator tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 serta Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan **sangat berhasil**, dengan nilai capaian keseluruhan indikator sebesar $\geq 91-100\%$.

Adapun pencapaian keberhasilan dari masing-masing 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan, dengan capaian sebesar 100,96%;
2. Indeks Kesalehan Sosial, dengan capaian sebesar 122,76%;
3. Indeks Wiliamson, dengan capaian sebesar 91,37%;
4. Indeks Pembangunan Manusia, dengan capaian sebesar 99,56%

Sedangkan 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan lainnya yang dikecualikan dari perhitungan rata-rata dikarenakan kondisi ekstrem pada nilai realisasi angka pertumbuhan ekonomi dan belum rilisnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi yakni sebagai berikut:

1. Angka Pertumbuhan Ekonomi, dengan capaian sebesar -35,43%;
2. Indeks Reformasi Birokrasi



Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 masing-masing mencapai rata-rata 99,25% dan 91,46%. Sedang realisasi anggaran belanja langsung yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Perubahan Tahun 2020 sebanyak 171 program dengan anggaran sebesar Rp.1.469.462.400.037,71 terealisasi sebesar 86,03% atau sebesar Rp.1.264.147.796.641,24.

Tingkat efisiensi kinerja tujuan strategis atas penggunaan sumber daya rata-rata dari 4 (empat) tujuan strategis sebesar 21,80%. Tingkat efisiensi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penggunaan sumber daya khususnya dalam penggunaan anggaran, masih perlu mendapat analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibanding dengan realisasi per program dan kegiatan.

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan SAKIP sesuai hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB
2. Melaksanakan upaya-upaya lainnya dalam rangka perbaikan SAKIP sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas pegawai yang berkaitan dengan SAKIP;
 - b. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra PD);
 - c. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen IKU Pemda dan IKU PD; dan



- d. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Matrik RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023

VISI : MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT DAN BERDAYA SAING

MISI I : Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	1.1 Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan mendorong dengan perkembangan ekonomi kreatif	PDRB	Memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0	Tahun 2019: Pembangunan berbasis keluarga & pendidikan karakter Tahun 2020: Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik Tahun 2021: Konektivitas infrastruktur Tahun 2022: Kelembagaan ekonomi desa Tahun 2023: Nilai tambah ekonomi & pembangunan berwawasan lingkungan	1. Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 2. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 Program Pengembangan budidaya perikanan 2 Program Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat perikanan tangkap 3 Program Optimalisasi pengelolaan & pemasaran produksi perikanan 4 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Program Peningkatan pengelolaan pasar 2 Program Peningkatan dan pengembangan perdagangan 3 Program Perlindungan konsumen 4 Program Pengamanan perdagangan 5 Program Pengembangan sentra sentra industri potensial	Dinas Pertanian Dinas Perikanan Disperindag
		1.2 Meningkatnya kunjungan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Mengembangkan destinasi wisata		1 Program Pengembangan pemasaran pariwisata 2 Program Pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
		1.3 Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat	Jumlah omset Usaha Mikro dan Koperasi	Mendorong tumbuh kembang dan kemandirian lembaga ekonomi masyarakat yang terstandarisasi		1 Program Pengembangan usaha koperasi 2 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro	Dinas Koperasi & UMKM
		1.4 Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	Mendorong inovasi pemerintahan desa dalam mengoptimalkan sumber daya desa		1 Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 2 Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 3 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

		1.5 Meningkatnya ketahanan pangan	Angka Ketahanan Pangan	Meningkatkan produksi, memperlancar distribusi dan diversifikasi pangan		<p>4 Program Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa</p> <p>1 Program Peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian</p> <p>2 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</p> <p>3 Program Peningkatan produksi hasil peternakan</p>	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	2.1 Meningkatkan kesempatan lapangan kerja baru	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>1 Memfasilitasi tumbuh kembangnya wirausaha pemula</p> <p>2 Mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)</p>		<p>1 Program Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja</p> <p>2 Program Pelatihan kerja dan produktivitas</p>	Dinas Tenaga Kerja
		2.2 Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS	Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial		<p>1 Program Pemberdayaan sosial (Keluarga fakir miskin)</p> <p>2 Program Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial</p> <p>3 Program Pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat</p> <p>4 Program Peningkatan pendataan kesejahteraan sosial</p> <p>5 Program Pelayanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial</p> <p>6 Program Perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>7 Program Pengembangan kesejahteraan sosial</p> <p>8 Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</p>	Dinas Sosial

MISI II : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal berbasis religiusitas dan budaya guna mewujudkan kohesi sosial

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
1 Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	1.1 Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan Perda	Meningkatkan upaya pencegahan & mengantisipasi terjadinya pelanggaran perda		<p>1 Program Penegakan peraturan daerah</p> <p>2 Program Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>3 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p> <p>4 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</p>	Satpol PP

		1.2 Menurunnya konflik sara	Jumlah konflik sara	Meningkatkan upaya pencegahan dan mengantisipasi terjadinya konflik sara		<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Program Peningkatan kesadaran hukum dan HAM 3 Program Pengembangan wawasan kebangsaan 4 Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 5 Program Peningkatan kerukunan umat beragama 	Bakesbangpol
--	--	-----------------------------	---------------------	--	--	--	--------------

MISI III : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
1 Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Wiliamson	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan 2 Meningkatkan pengawasan dan penindakan kasus-kasus pelanggaran hukum lingkungan 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2 Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 	Dinas Lingkungan Hidup
		2 Menurunnya dampak bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan upaya mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 2 Program Tanggap darurat bencana 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3 Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan meningkatkan kondisi infrastruktur daerah		<ol style="list-style-type: none"> 3 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi 1 Program Pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung 2 Program Pemeliharaan jalan dan infrastruktur jalan 3 Program Pembangunan jalan dan jembatan 	Dinas PU Bina Marga
		4 Meningkatnya aksesibilitas transportasi	Indeks Aksesibilitas Transportasi	Meningkatkan konektivitas melalui sistem transportasi yang terintegrasi		<ol style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan pelayanan angkutan umum 2 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi LLAJ 3 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 4 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 	Dinas Perhubungan

		2. Meningkatnya kualitas Sistem Keuangan Daerah	Opini BPK	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah	14 Program Pelayanan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat	
		3. Meningkatnya kualitas layanan publik	IKM	<p>1 Mendorong tumbuhnya inovasi dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2 Menguatkan BUMD yg sudah ada & mendirikan BUMD baru yang potensial dan layak untuk dikembangkan</p>	<p>1 Program Peningkatan pelayanan pajak daerah</p> <p>2 Program Peningkatan pajak daerah</p> <p>1 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah</p> <p>1 Program Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p>2 Program Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan pendaftaran</p> <p>3 Program Peningkatan pelayanan</p> <p>4 Program Kuantitas pelayanan pencatatan sipil melalui komitmen berbagai pihak terkait dan peran serta masyarakat</p> <p>1 Program Kerjasama informasi dan media massa</p> <p>2 Program Pengelolaan pengembangan dan pemberdayaan TIK</p> <p>3 Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai</p> <p>1 Program Pengembangan perpustakaan</p> <p>2 Program Penyelamatan & pelestarian dokumen/arsip daerah</p> <p>3 Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</p> <p>4 Program Peningkatan kualitas pelayanan prasarana kearsipan</p> <p>1 Program Penanaman Modal</p>	<p>Badan Keuangan Daerah</p> <p>Inspektorat</p> <p>Dispendukcapil</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p> <p>Kecamatan</p> <p>Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah</p>
		4. Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar lebih efisien dan efektif	1 Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan	
					1 Program Pendidikan kedinasan	

MISI V : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan	Indeks Kesehatan	Menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar kesehatan yg terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat		1 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2 Program Perbaikan gizi masyarakat 3 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5 Program Pengembangan lingkungan sehat 6 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 7 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 8 Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 9 Program Pembinaan lingkungan sosial 10 Program Upaya kesehatan masyarakat 11 Program Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 12 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 13 Program Peningkatan kualitas pelayanan RSUD 14 Program Pengembangan manajemen kesehatan 15 Program Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		2. Meningkatnya pelayanan dasar pendidikan	Indeks Pendidikan	1 Meningkatkan pemerataan partisipasi sekolah 2 Melaksanakan wajib madin secara masif dg		1 Program Peningkatan mutu pelayanan RSUD 2 Program Pembinaan lingkungan sosial 3 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 4 Program Peningkatan mutu pelayanan BLUD	RSUD Bangil
						1 Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) 2 Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 3 Program Pendidikan non formal 4 Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik	Dinas Pendidikan

				mengintegrasikan pemda dan seluruh komponen masyarakat		5 Program Pendidikan berkarakter	
		3 Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	Memfasilitasi terbelitnya sembilan kebutuhan dasar pokok masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan dan pengembangan perdagangan 2 Program Peningkatan pengelolaan pasar 3 Program Perlindungan konsumen 4 Program Pengamanan perdagangan 5 Program Peningkatan industri 6 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Indeks Permukiman Layah Huni	Meningkatkan kualitas lingkungan rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh		<ul style="list-style-type: none"> 1 Program Pengembangan kinerja pengolahan air minum dan sanitasi 2 Program Lingkungan sehat kawasan permukiman 3 Program Pengembangan perumahan 	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5 Meningkatnya kesetaraan masyarakat	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam menangani urusan publik		<ul style="list-style-type: none"> 1 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 3 Program Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 5 Program Keluarga berencana 6 Program Pelayanan kontrasepsi 7 Program Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana penyuluh KB 8 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 9 Program Keluarga sejahtera 	Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan
		6 Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda (Per 100.000 pemuda)	Rasio Pemuda Berprestasi	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan untuk menumbuh kembangkan prestasi pemuda		<ul style="list-style-type: none"> 1 Program Peningkatan peran serta kepemudaan 	Dinas Pemuda dan Olahraga



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Jabatan : Bupati Pasuruan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pasuruan, 2 November 2020

BUPATI PASURUAN

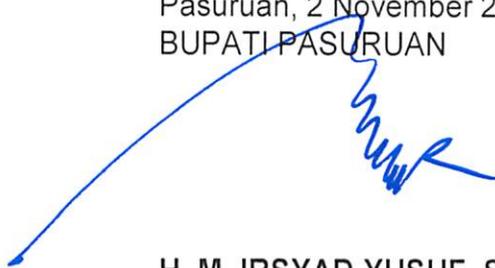
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. M. Irsyad Yusuf", is written over the printed name of the Bupati Pasuruan.

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Misi 1 :	Meningkatnya kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat			
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73 - 6
1.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	%	9,35
Misi 2 :	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial			
2.1	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial		62,40
Misi 3 :	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan			
3.1	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indek Wiliamson		0,255
Miisi 4 :	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
4.1	Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks reformasi birokrasi		64,00
Misi 5 :	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan			
5.1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	IPM		68,90

Pasuruan, 2 November 2020
BUPATI PASURUAN



H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

PROGRAM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020
(PERUBAHAN)

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN 2020
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS SEKTOR-SEKTOR PRODUKSI DAN PRODUK-PRODUK UNGGULAN KABUPATEN PASURUAN MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL DAN MENINGKATKAN NILAI TAMBAH EKONOMI DESA BERBASIS MASYARAKAT DENGAN CARA MEMPERMUDAH ASPEK LEGAL DAN PEMBIAYAAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
TUJUAN : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
INDIKATOR KINERJA 1 : ANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI		
1	PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	994.391.937,00
2	PROGRAM PERDAGANGAN	471.260.801,00
3	PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA	2.577.863.220,00
4	PROGRAM KENELAYANAN	399.285.000,00
5	PROGRAM KESEHATAN HEWAN	1.444.819.782,42
6	PROGRAM USAHA PETERNAKAN	476.321.290,00
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU	267.970.000,00
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	580.458.219,00
9	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA HASIL PERTANIAN	13.654.444.150,00
10	PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.291.702.206,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN PASAR	16.013.399.000,00
12	PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	472.301.399,74
13	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI	217.026.638,00
14	PROGRAM USAHA PERIKANAN	225.285.000,00
15	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI	27.223.765,00
16	PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRI	698.815.500,00
17	PROGRAM SENI DAN BUDAYA	1.626.818.500,00
18	PROGRAM DESTINASI WISATA	5.930.138.392,00
19	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DAN KELURAHAN	93.631.600,00
20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	608.488.500,00
21	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	254.043.000,00
22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	2.285.901.534,00
23	PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA	344.050.000,00
24	PROGRAM PROMOSI PARIWISATA	1.197.165.000,00
	JUMLAH	52.152.804.434,16

INDIKATOR KINERJA 2 : ANGKA KEMISKINAN		
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN	2.005.868.435,00
2	PROGRAM FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.278.351.675,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PARTIIPASI MASYARAKAT	68.876.824,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	382.708.950,00
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	1.237.612.055,00

6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	1.072.032.000,00
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	991.572.500,00
8	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	584.004.700,00
9	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	391.830.000,00
10	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	887.953.730,50
	JUMLAH	8.900.810.869,50
	TOTAL MISI 1	61.053.615.303,66

MISI 2 : MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KELUARGA DENGAN MEMANFAATKAN MODAL SOSIAL BERBASIS RELIGIUSITAS DAN BUDAYA, GUNA MEWUJUDKAN KOHESI SOSIAL		
TUJUAN : MEWUJUDKAN KERUKUNAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM		
INDIKATOR KINERJA : INDEKS KESALEHAN SOSIAL		
1	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.331.000,00
2	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	218.639.000,00
3	PROGRAM LAYANAN NON PERIZINAN	201.805.257,00
4	PROGRAM LAYANAN PERIZINAN	155.546.400,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	35.680.000,00
6	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	222.150.000,00
7	PROGRAM PENANAMAN MODAL	730.967.750,00
8	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	93.240.000,00
9	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL	261.810.000,00
10	PROGRAM KESATUAN BANGSA	349.683.000,00
11	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	1.609.412.000,00
12	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI	172.310.000,00
	JUMLAH	4.077.574.407,00
	TOTAL MISI 2	4.077.574.407,00

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH UNTUK PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN PEMANFAATAN SEGENAP POTENSI SUMBER DAYA ALAM SECARA BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK KONSERVASI LINGKUNGAN DI KABUPATEN PASURUAN		
TUJUAN : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN		
INDIKATOR KINERJA : INDEKS WILIAMSON		
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN JARINGAN JALAN	1.202.665.100,00
2	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT KAWASAN PERMUKIMAN	16.173.376.200,00
3	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	403.734.500,00
4	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	33.464.219.515,00
5	PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMBINAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG	13.211.005.499,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN	1.389.113.000,00
7	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN	1.713.699.650,00
8	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	210.872.554.895,00
9	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	902.585.000,00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI	57.495.788.600,00

11	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.334.637.276,00
12	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	778.375.460,00
13	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.501.370.320,00
14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	6.098.175.674,00
15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.125.807.772,00
16	PROGRAM PENGAMANAN LALU LINTAS	4.912.477.000,00
17	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	3.035.285.100,00
18	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	513.660.000,00
19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM	832.945.000,00
20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	495.698.300,00
21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI	27.019.329.881,00
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	248.870.510,00
23	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	573.722.617,00
24	PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA	1.050.555.000,00
25	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN DAN INFRASTRUKTUR JALAN	46.023.219.530,00
	JUMLAH	440.372.871.399,00
	TOTAL MISI 3	440.372.871.399,00

MISI 4 : MEMPERKUAT DAN MEMPERLUAS REFORMASI BIROKRASI YANG MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF, BERSIH, EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI		
TUJUAN : MEWUJUDKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RESPONSIF		
INDIKATOR KINERJA : INDEKS REFORMASI BIROKRASI		
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.330.965.360,00
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.976.674.230,00
3	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	851.712.490,00
4	PROGRAM OPTIMALISASI FASILITASI REFORMASI BIROKRASI	1.404.736.425,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	57.901.531.400,00
6	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH	2.040.379.856,50
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	4.940.773.054,60
8	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	647.235.864,00
9	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI BIDANG PEREKONOMIAN	583.903.000,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	36.112.217.415,75
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	25.015.000,00
12	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	717.753.896,50
13	PROGRAM FASILITASI DAN PEMBIAYAAN	169.708.440,00
14	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	3.546.779.182,20
15	PROGRAM PEMBINAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	287.374.160,00
16	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	27.761.500,00
17	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	157.703.468.252,13

18	PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.403.319.745,00
19	PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN APARATUR	1.398.549.674,00
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1.120.167.300,00
21	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	194.266.500,00
22	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.229.367.888,50
23	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1.940.393.273,00
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNIKASI PUBLIK	586.593.020,00
25	PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	526.550.267,30
26	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.126.500.839,00
27	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	191.351.045,00
28	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	902.790.005,00
29	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	381.422.288,00
30	PROGRAM PENGENDALIAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN PENGADUAN	184.874.650,00
31	PROGRAM PENGEOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.990.171.240,00
32	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1.651.800.100,00
33	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	3.048.693.500,00
34	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	1.091.174.000,00
35	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	4.747.334.425,00
36	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	266.936.600,00
37	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38.930.308.741,83
38	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	2.070.648.837,50
39	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.470.372.186,30
40	PROGRAM KEARSIPAN	848.341.000,00
41	PROGRAM PERPUSTAKAAN	806.430.000,00
42	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	488.190.000,00
43	PROGRAM KEMETROLOGIAN LEGAL	305.256.000,00
44	SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI	1.605.005.000,00
45	PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN KEWILAYAHAN	943.499.112,00
46	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	3.494.113.700,00
47	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	663.409.400,00
	JUMLAH	352.875.819.864,11
	TOTAL MISI 4	352.875.819.864,11

MISI 5 : MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR TERUTAMA PELAYANAN KESEHATAN, PERMUKIMAN DAN PENDIDIKAN DENGAN MENINGTEGRASIKAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SEBAGAI WUJUD AFIRMASI PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PASURUAN		
TUJUAN : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS		
INDIKATOR KINERJA : IPM		
1	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	8.916.055.837,00
2	PROGRAM KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PENGGERAKAN	466.382.504,00
3	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	3.019.330.309,00

4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	824.872.000,00
5	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	9.022.429.498,00
6	PROGRAM PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SLTP	32.649.702.982,80
7	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN BANGIL	5.361.344.995,13
8	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN BEJI	5.129.584.221,04
9	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN GRATI	5.743.475.659,97
10	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN GEMPOL	6.940.343.235,12
11	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN GONDANGWETAN	3.954.863.360,58
12	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN KEJAYAN	5.256.252.470,08
13	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN KRATON	5.605.701.882,22
14	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN LEKOK	4.332.042.196,08
15	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN LUMBANG	3.067.413.249,28
16	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN NGULING	4.804.609.408,24
17	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PANDAAN	7.115.452.279,48
18	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PASREPAN	4.070.707.227,28
19	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN POHJENTREK	2.214.692.042,47
20	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PRIGEN	4.846.347.887,61
21	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PURWODADI	5.377.260.038,34
22	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PURWOSARI	5.345.228.904,89
23	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PUSPO	2.679.923.533,97
24	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN REJOSO	2.891.933.548,39
25	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN REMBANG	4.401.840.692,96
26	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN SUKOREJO	5.005.463.282,72
27	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN TOSARI	2.105.205.972,44
28	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN TUTUR	3.380.280.752,42
29	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN WINONGAN	3.159.992.679,43
30	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN WONOREJO	4.083.773.734,25
31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	576.404.000,00
32	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN UPTD RSUD	21.913.669.450,00
33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	20.944.599.000,00
34	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	344.188.500,00
35	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	3.834.565.500,00
36	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	10.184.553.454,00
37	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	13.250.142.286,00
38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	153.496.495,00

39	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	4.471.672.057,00
40	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.166.152.400,00
41	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS	113.638.643.723,11
42	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	162.603.062.991,64
43	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.663.990.000,00
44	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	15.983.440.000,00
45	PROGRAM PENDIDIKAN BERKARAKTER	318.564.500,00
46	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	235.607.000,00
47	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	675.879.850,00
48	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	213.820.000,00
49	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	555.302.640,00
50	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1.343.069.466,00
51	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	825.313.766,00
52	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.979.904.500,00
53	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	62.433.971.100,00
	JUMLAH	611.082.519.063,94
	TOTAL MISI 5	611.082.519.063,94
	TOTAL ANGGARAN TAHUN 2020	1.469.462.400.037,71

Pasuruan, 2 November 2020
 BUPATI PASURUAN

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Matriks Pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020

Tujuan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Simpulan	Sumber Data/SKPD Penanggungjawab		
Uraian	Indikator Kinerja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5:4	(7)	(8)		
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73 - 6	-2,03	-35,43	Tidak Berhasil	LKPJ Bupati Pasuruan 2020/Disperindag, Disperta, Disparkeb. dan DinkopUMKM serta DPMD
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2.1	Angka Kemiskinan	%	9,35	9,26	100,96	Sangat Berhasil	LKPJ Bupati Pasuruan 2020/Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja
3	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	3.1	Indeks Kesalehan Sosial	-	62,40	76,60	122,76	Sangat Berhasil	Hasil kajian Bappeda Kabupaten Pasuruan/Satpol PP dan Bakesbangpol
4	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	4.1	Indeks Wiliamson	-	0,26	0,28	91,37	Sangat Berhasil	LKPJ Bupati Pasuruan 2020/DPU Bina Marga, Dinas SDA & Tata Ruang, Bappeda dan DLH
5	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	64,00	0,00	0,00	Tidak Berhasil	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi KemenPAN RB /Inspektorat, BKD, Bappeda, Setda, BKPPD, DPMPT, Dispendukcapil & Diskominfo
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	6.1	Indeks Pembangunan Manusia	-	68,90	68,60	99,56	Sangat Berhasil	LKPJ Bupati Pasuruan 2020/Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2020

Tujuan		Satuan	Kinerja			Anggaran				
Uraian	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5:4	(7)	(8)	(9)		
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73 - 6	-2,03	-35,43	52.152.804.434,16	43.027.308.856,00	82,50
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2.1	Angka Kemiskinan	%	9,35	9,26	100,96	8.900.810.869,50	7.616.170.479,00	85,57
3	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	3.1	Indeks Kesalehan Sosial	-	62,4	76,6	122,76	4.077.574.407,00	2.813.533.663,00	69,00
4	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	4.1	Indeks Williamson	-	0,255	0,277	91,37	440.372.871.399,00	365.233.885.678,00	82,94
5	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	64	0	0,00	352.875.819.864,11	295.690.254.618,00	83,79
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	6.1	Indeks Pembangunan Manusia	-	68,9	68,6	99,56	611.082.519.063,94	549.766.643.347,24	89,97
JUMLAH						1.469.462.400.037,71	1.264.147.796.641,24	86,03		

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2020

Tujuan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran			Tingkat	
Uraian	Indikator Kinerja					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73 - 6	-2,03	-35,42757	Rp 52.152.804.434,16	Rp 43.027.308.856,00	82,50	-117,93
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	%	9,35	9,26	100,9626	Rp 8.900.810.869,50	Rp 7.616.170.479,00	85,57	15,40
3	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	-	62,4	76,6	122,7564	Rp 4.077.574.407,00	Rp 2.813.533.663,00	69,00	53,76
4	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Wiliamson	-	0,255	0,277	91,37255	Rp 440.372.871.399,00	Rp 365.233.885.678,00	82,94	8,44
5	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	-	64	0	0	Rp 352.875.819.864,11	Rp 295.690.254.618,00	83,79	0,00
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	-	68,9	68,6	99,56459	Rp 611.082.519.063,94	Rp 549.766.643.347,24	89,97	9,60
JUMLAH							1.469.462.400.037,71	1.264.147.796.641,24	86,03	
Rata-Rata Tingkat Efisiensi							-	-		21,80

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2020

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
MISI I : Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat			
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi			
Indikator Kinerja : Angka Pertumbuhan Ekonomi			
1	PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 994.391.937,00	Rp 949.505.636,00
2	PROGRAM PERDAGANGAN	Rp 471.260.801,00	Rp 452.951.150,00
3	PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 2.577.863.220,00	Rp 2.397.677.489,00
4	PROGRAM KENELAYANAN	Rp 399.285.000,00	Rp 374.448.850,00
5	PROGRAM KESEHATAN HEWAN	Rp 1.444.819.782,42	Rp 1.311.254.302,00
6	PROGRAM USAHA PETERNAKAN	Rp 476.321.290,00	Rp 446.670.804,00
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU	Rp 267.970.000,00	Rp 90.148.500,00
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Rp 580.458.219,00	Rp 432.089.250,00
9	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA HASIL PERTANIAN	Rp 13.654.444.150,00	Rp 9.566.059.945,00
10	PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Rp 1.291.702.206,00	Rp 1.086.499.486,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN PASAR	Rp 16.013.399.000,00	Rp 14.709.184.050,00
12	PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Rp 472.301.399,74	Rp 131.928.300,00
13	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI	Rp 217.026.638,00	Rp 195.003.400,00
14	PROGRAM USAHA PERIKANAN	Rp 225.285.000,00	Rp 223.995.000,00
15	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI	Rp 27.223.765,00	Rp 23.866.000,00
16	PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRI	Rp 698.815.500,00	Rp 547.398.465,00
17	PROGRAM SENI DAN BUDAYA	Rp 1.626.818.500,00	Rp 1.486.686.500,00
18	PROGRAM DESTINASI WISATA	Rp 5.930.138.392,00	Rp 4.339.116.633,00
19	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DAN KELURAHAN	Rp 93.631.600,00	Rp 75.699.700,00
20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Rp 608.488.500,00	Rp 500.859.200,00
21	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Rp 254.043.000,00	Rp 247.179.000,00
22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	Rp 2.285.901.534,00	Rp 2.116.315.668,00
23	PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA	Rp 344.050.000,00	Rp 340.670.000,00
24	PROGRAM PROMOSI PARIWISATA	Rp 1.197.165.000,00	Rp 982.101.528,00
	JUMLAH	Rp 52.152.804.434,16	Rp 43.027.308.856,00

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Indikator kinerja : Angka Kemiskinan			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN	Rp 2.005.868.435,00	Rp 1.664.795.859,00
2	PROGRAM FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 1.278.351.675,00	Rp 1.234.652.031,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PARTIIPASI MASYARAKAT	Rp 68.876.824,00	Rp 65.882.824,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 382.708.950,00	Rp 307.814.200,00
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Rp 1.237.612.055,00	Rp 1.222.081.911,00
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Rp 1.072.032.000,00	Rp 1.016.693.000,00
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Rp 991.572.500,00	Rp 693.795.000,00
8	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	Rp 584.004.700,00	Rp 268.425.800,00
9	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 391.830.000,00	Rp 300.293.500,00
10	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 887.953.730,50	Rp 841.736.354,00
	JUMLAH	Rp 8.900.810.869,50	Rp 7.616.170.479,00
	TOTAL MISI 1	Rp 61.053.615.303,66	Rp 50.643.479.335,00

MISI II : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal berbasis religiusitas dan budaya guna mewujudkan kohesi sosial

Tujuan : Mewujudkan kerukunan, keamanan dan ketertiban umum					
Indikator kinerja : Indeks Kesalehan Sosial					
1	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	26.331.000,00	Rp	23.978.000,00
2	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	218.639.000,00	Rp	181.661.416,00
3	PROGRAM LAYANAN NON PERIZINAN	Rp	201.805.257,00	Rp	169.796.388,00
4	PROGRAM LAYANAN PERIZINAN	Rp	155.546.400,00	Rp	116.157.809,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	Rp	35.680.000,00	Rp	35.513.550,00
6	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	Rp	222.150.000,00	Rp	129.838.250,00
7	PROGRAM PENANAMAN MODAL	Rp	730.967.750,00	Rp	131.531.950,00
8	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	Rp	93.240.000,00	Rp	92.706.950,00
9	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL	Rp	261.810.000,00	Rp	60.395.000,00
10	PROGRAM KESATUAN BANGSA	Rp	349.683.000,00	Rp	293.356.000,00
11	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Rp	1.609.412.000,00	Rp	1.421.414.150,00
12	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI	Rp	172.310.000,00	Rp	157.184.200,00
	JUMLAH	Rp	4.077.574.407,00	Rp	2.813.533.663,00
	TOTAL MISI 2	Rp	4.077.574.407,00	Rp	2.813.533.663,00

MISI III : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan					
Tujuan : Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan					
Indikator kinerja : Indeks Williamson					
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN JARINGAN JALAN	Rp	1.202.665.100,00	Rp	676.018.300,00
2	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	16.173.376.200,00	Rp	8.995.108.628,00
3	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Rp	403.734.500,00	Rp	371.527.700,00
4	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	Rp	33.464.219.515,00	Rp	32.576.152.020,00
5	PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMBINAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	13.211.005.499,00	Rp	11.585.027.000,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN	Rp	1.389.113.000,00	Rp	1.264.563.348,00
7	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN	Rp	1.713.699.650,00	Rp	1.623.475.800,00
8	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Rp	210.872.554.895,00	Rp	175.732.685.176,00
9	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Rp	902.585.000,00	Rp	902.165.000,00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI	Rp	57.495.788.600,00	Rp	36.919.277.775,00
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	7.334.637.276,00	Rp	7.173.409.380,00
12	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Rp	778.375.460,00	Rp	757.745.000,00
13	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	3.501.370.320,00	Rp	2.743.445.695,00
14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rp	6.098.175.674,00	Rp	5.891.716.176,00
15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	1.125.807.772,00	Rp	923.806.605,00
16	PROGRAM PENGAMANAN LALU LINTAS	Rp	4.912.477.000,00	Rp	4.565.652.630,00
17	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	3.035.285.100,00	Rp	2.955.583.200,00
18	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Rp	513.660.000,00	Rp	477.077.500,00
19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM	Rp	832.945.000,00	Rp	759.917.550,00
20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Rp	495.698.300,00	Rp	469.139.900,00
21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI	Rp	27.019.329.881,00	Rp	24.717.136.450,00
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	248.870.510,00	Rp	216.320.641,00
23	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Rp	573.722.617,00	Rp	566.208.642,00
24	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp	-	Rp	-
25	PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA	Rp	1.050.555.000,00	Rp	884.266.500,00
26	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN DAN INFRASTRUKTUR JALAN	Rp	46.023.219.530,00	Rp	41.486.459.062,00
	JUMLAH	Rp	440.372.871.399,00	Rp	365.233.885.678,00
	TOTAL MISI 3	Rp	440.372.871.399,00	Rp	365.233.885.678,00

MISI IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
Tujuan : Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif			
Indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi			
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 1.330.965.360,00	Rp 1.329.879.229,00
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.976.674.230,00	Rp 1.790.964.227,00
3	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Rp 851.712.490,00	Rp 731.250.414,00
4	PROGRAM OPTIMALISASI FASILITASI REFORMASI BIROKRASI	Rp 1.404.736.425,00	Rp 1.236.986.250,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp 57.901.531.400,00	Rp 54.874.016.250,00
6	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH	Rp 2.040.379.856,50	Rp 1.955.337.061,00
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	Rp 4.940.773.054,60	Rp 4.500.612.239,00
8	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Rp 647.235.864,00	Rp 535.771.215,00
9	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI BIDANG PEREKONOMIAN	Rp 583.903.000,00	Rp 450.513.495,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Rp 36.112.217.415,75	Rp 5.074.012.749,00
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 25.015.000,00	Rp 4.600.000,00
12	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Rp 717.753.896,50	Rp 642.554.555,00
13	PROGRAM FASILITASI DAN PEMBIAYAAN	Rp 169.708.440,00	Rp 127.378.270,00
14	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Rp 3.546.779.182,20	Rp 3.532.804.193,00
15	PROGRAM PEMBINAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	Rp 287.374.160,00	Rp 246.799.160,00
16	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 27.761.500,00	Rp 27.280.500,00
17	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 157.703.468.252,13	Rp 147.244.540.007,00
18	PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Rp 1.403.319.745,00	Rp 1.294.917.140,00
19	PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN APARATUR	Rp 1.398.549.674,00	Rp 1.135.322.055,00
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Rp 1.120.167.300,00	Rp 974.579.392,00
21	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Rp 194.266.500,00	Rp 184.958.100,00
22	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp 1.229.367.888,50	Rp 1.189.165.779,00
23	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Rp 1.940.393.273,00	Rp 1.936.803.403,00
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 586.593.020,00	Rp 505.599.322,00
25	PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Rp 526.550.267,30	Rp 491.946.161,00
26	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 5.126.500.839,00	Rp 4.893.496.009,00
27	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp 191.351.045,00	Rp 159.397.331,00
28	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	Rp -	Rp -
29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp 902.790.005,00	Rp 716.806.505,00
30	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Rp 381.422.288,00	Rp 336.173.738,00
31	PROGRAM PENGENDALIAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN PENGADUAN	Rp 184.874.650,00	Rp 149.961.847,00
32	PROGRAM PENGEOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4.990.171.240,00	Rp 4.893.488.730,00
33	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Rp 1.651.800.100,00	Rp 1.392.548.898,00
34	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 3.048.693.500,00	Rp 2.840.843.500,00
35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Rp 1.091.174.000,00	Rp 768.430.708,00
36	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Rp 4.747.334.425,00	Rp 4.286.960.804,00
37	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 266.936.600,00	Rp 92.176.000,00
38	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 38.930.308.741,83	Rp 33.919.394.516,00
39	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Rp 2.070.648.837,50	Rp 1.544.819.056,00
40	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 1.470.372.186,30	Rp 1.085.994.317,00
41	PROGRAM KEARSIPAN	Rp 848.341.000,00	Rp 821.232.650,00
42	PROGRAM PERPUSTAKAAN	Rp 806.430.000,00	Rp 652.091.609,00
43	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	Rp 488.190.000,00	Rp 232.695.550,00
44	PROGRAM KEMETROLOGIAN LEGAL	Rp 305.256.000,00	Rp 264.712.000,00
45	SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI	Rp 1.605.005.000,00	Rp 1.576.563.650,00
46	PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN KEWILAYAHAN	Rp 943.499.112,00	Rp 799.968.900,00

47	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp	3.494.113.700,00	Rp	1.630.824.370,00
48	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp	663.409.400,00	Rp	613.082.764,00
	JUMLAH	Rp	352.875.819.864,11	Rp	295.690.254.618,00
	TOTAL MISI 4	Rp	352.875.819.864,11	Rp	295.690.254.618,00

MISI V : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan					
Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas					
Indikator kinerja : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
1	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp	8.916.055.837,00	Rp	3.960.733.733,00
2	PROGRAM KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PENGGERAKAN	Rp	466.382.504,00	Rp	412.253.324,00
3	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Rp	3.019.330.309,00	Rp	2.822.121.350,00
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Rp	824.872.000,00	Rp	661.275.000,00
5	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Rp	9.022.429.498,00	Rp	8.234.637.071,00
6	PROGRAM PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SLTP	Rp	32.649.702.982,80	Rp	32.252.957.206,48
7	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN BANGIL	Rp	5.361.344.995,13	Rp	5.293.923.259,60
8	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN BEJI	Rp	5.129.584.221,04	Rp	5.013.364.373,98
9	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN GRATI	Rp	5.743.475.659,97	Rp	5.669.187.114,68
10	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN GEMPOL	Rp	6.940.343.235,12	Rp	6.849.487.618,60
11	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN GONDANGWETAN	Rp	3.954.863.360,58	Rp	3.906.835.437,00
12	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN KEJAYAN	Rp	5.256.252.470,08	Rp	5.128.669.194,00
13	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN KRATON	Rp	5.605.701.882,22	Rp	5.514.590.349,00
14	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN LEKOK	Rp	4.332.042.196,08	Rp	4.244.239.474,00
15	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN LUMBANG	Rp	3.067.413.249,28	Rp	2.970.951.644,00
16	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN NGULING	Rp	4.804.609.408,24	Rp	4.712.116.700,08
17	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PANDAAN	Rp	7.115.452.279,48	Rp	7.029.363.588,02
18	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PASREPAN	Rp	4.070.707.227,28	Rp	3.993.460.458,55
19	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN POHJENTREK	Rp	2.214.692.042,47	Rp	2.184.308.410,00
20	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PRIGEN	Rp	4.846.347.887,61	Rp	4.740.681.120,00
21	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PURWODADI	Rp	5.377.260.038,34	Rp	5.332.160.454,00
22	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PURWOSARI	Rp	5.345.228.904,89	Rp	5.272.116.718,00
23	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN PUSPO	Rp	2.679.923.533,97	Rp	2.641.304.949,93
24	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN REJOSO	Rp	2.891.933.548,39	Rp	2.801.365.589,00
25	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN REMBANG	Rp	4.401.840.692,96	Rp	4.369.909.863,00
26	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN SUKOREJO	Rp	5.005.463.282,72	Rp	4.846.990.816,00
27	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN TOSARI	Rp	2.105.205.972,44	Rp	2.050.067.287,00
28	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN TUTUR	Rp	3.380.280.752,42	Rp	3.346.422.584,00
29	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH	Rp	3.159.992.679,43	Rp	3.113.597.934,32
30	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SD NEGERI DI WILAYAH	Rp	4.083.773.734,25	Rp	4.029.266.543,00
31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Rp	576.404.000,00	Rp	571.110.240,00
32	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN UPTD RSUD	Rp	21.913.669.450,00	Rp	20.523.398.388,00

33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Rp 20.944.599.000,00	Rp 19.847.342.919,00
34	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Rp 344.188.500,00	Rp 239.811.997,00
35	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Rp 3.834.565.500,00	Rp 3.348.560.428,00
36	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Rp 10.184.553.454,00	Rp 8.543.752.353,00
37	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN	Rp 13.250.142.286,00	Rp 12.667.553.424,00
38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	Rp 153.496.495,00	Rp 151.981.250,00
39	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Rp 4.471.672.057,00	Rp 3.715.250.735,00
40	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 1.166.152.400,00	Rp 1.121.802.699,00
41	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS	Rp 113.638.643.723,11	Rp 86.288.163.807,00
42	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	Rp 162.603.062.991,64	Rp 149.206.933.596,00
43	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 7.663.990.000,00	Rp 7.641.156.500,00
44	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Rp 15.983.440.000,00	Rp 15.460.912.704,00
45	PROGRAM PENDIDIKAN BERKARAKTER	Rp 318.564.500,00	Rp 211.408.500,00
46	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Rp 235.607.000,00	Rp 17.575.000,00
47	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Rp 675.879.850,00	Rp 405.691.983,00
48	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Rp 213.820.000,00	Rp 197.620.279,00
49	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Rp 555.302.640,00	Rp 326.370.571,00
50	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Rp 1.343.069.466,00	Rp 611.250.580,00
51	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 825.313.766,00	Rp 705.535.900,00
52	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 5.979.904.500,00	Rp 3.941.779.387,00
53	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Rp 62.433.971.100,00	Rp 60.623.320.943,00
	JUMLAH	Rp 611.082.519.063,94	Rp 549.766.643.347,24
	TOTAL MISI 5	Rp 611.082.519.063,94	Rp 549.766.643.347,24
	TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2020	Rp 1.469.462.400.037,71	Rp 1.264.147.796.641,24



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR: 050/ 199 /HK/424.014/2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERIODE 2018 - 2023
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, maka IKU yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan Periode 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang digunakan untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 02 - Jan - 2019

BUPATI PASURUAN,



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 050/199/HK/424.014/2019
 TANGGAL : 02 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 2018-2023

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	$\left(\frac{PDRB\ ADHK\ th\ N}{PDRB\ ADHK\ th\ N - 1} - 1 \right) \times 100\%$	Hasil survey Badan Pusat Statistik	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Disperindag, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	$\frac{\sum \text{penduduk di bawah garis kemiskinan}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$	Hasil survey Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial
3	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	Skor yang diperoleh dari sikap seseorang/responden yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat yang diukur dengan solidaritas sosial, kerjasama/mutualitas, toleransi, adil dan menjaga ketertiban umum	Hasil survey Badan Pusat Statistik	Satpol PP, Bakesbangpol
4	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indek Wiliamson	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 \cdot f_i}}{Y}$	Hasil survey Badan Pusat Statistik	Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, PU SDA dan Tata Ruang
			$Y_i = \text{pdrb perkapita kec } i$		
			$Y = \text{pdrb perkapita kab}$		
			$f_i = \text{penduduk kec } i$		
			$n = \text{penduduk kab}$		
5	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Indeks reformasi birokrasi	Hasil Evaluasi reformasi birokrasi Pemda oleh KemenPAN-RB tahun n-1	LHE KemenPAN-RB	Setda, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, inspektorat, Dispendukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kominfo, Setwan, Perpus dan Arsip, Kecamatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
6	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	Hasil survey Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Disperindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman





**DAFTAR PENGHARGAAN
YANG DITERIMA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020**

No	Prestasi / Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif(SP2SP) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	Kementerian Kesehatan RI
2.	Institusi Yang Berjasa Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	Kementerian Kesehatan RI
3.	Desa Tangguh Bencana Kategori Utama	Desa Prodo Kecamatan Winongan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4.	Lomba Bumdesa Tingkat Provinsi Juara Harapan II)	Ketua Bumdesa Wonosari Kecamatan Tukur	DPMD Tingkat Provinsi
5.	Lomba Video Kreatif Tingkat Provinsi (Juara Harapan I)	Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tukur	DPMD Tingkat Provinsi
6.	Adiwiyata Provinsi	SMPN 3 Nguling Dan SMKN 1 Tukur	Gubernur Jawa Timur
7.	Penghargaan Kepala Daerah Inovatif	Diskominfo Kab. Pasuruan	Sindo/ MNC Media
8.	Top Digital Award 2020	Diskominfo Kab. Pasuruan	It Works
9.	Top Digital Implementation 2020 On District Government # Level Star 4	Diskominfo Kab. Pasuruan	It Works
10.	Top Leader On Digital Implementation 2020	Diskominfo Kab. Pasuruan	It Works
11.	Top Digital Transformation Readiness 2020	Diskominfo Kab. Pasuruan	It Works
12.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kab. Pasuruan	Diskominfo Kab. Pasuruan	Kementrian PAN RB



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

No	Prestasi / Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
13.	Pemuda Pelopor	Lolita Febrianti	Dispora Jawa Timur
14.	Ppan (Australia)	Alfin Nurul Firdaus.	Dispora Jawa Timur
15.	Pepelingasih	Alfin Nurul Firdaus.	Dispora Jawa Timur
16	Pepelingasih	Rendy	Dispora Jawa Timur
17.	Jpi (Jambore Pemuda Indonesia)	Lolita Febrianti	Dispora Jawa Timur
18.	Penataan Produk Terbaik Kategori Dekranasda Provinsi Jawa Timur	Disperindag	Dekranasda Provinsi Jawa Timur
19.	Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Skor 3,4784 Dan Status Sangat Tinggi	Bupati Pasuruan	Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah
20.	Peringkat Pertama Pendukung Sistem Kredit Program Lingkup Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Pasuruan	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
21.	Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019	Bupati Pasuruan	Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
22.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019	Bupati Pasuruan	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT

Jalan Ir. H. JUANDA No. 58 Telp. (0343) 425581, 424182 Fax. (0343) 424182
PASURUAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini namun ada beberapa catatan pada laporan kinerja sebagaimana daftar periksa (check list) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil reviu.

Pasuruan, 19 Maret 2021

**INSPEKTUR
KABUPATEN PASURUAN**

drh. IRIANTO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010